



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2025



KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2009

# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar masing-masing daerah (provinsi, kabupaten dan kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

RPJPD Kota Padang Panjang adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang yang mencakup kurun waktu tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RPJPD Kota Padang Panjang melibatkan pihak eksekutif, legislatif serta tokoh dan pemuka masyarakat, alim ulama, bundo kanduang dan cerdas pandai setempat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Padang Panjang sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan didirikannya Kota Padang Panjang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan

yang disepakati bersama. Dengan adanya arah pembangunan daerah tersebut, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang.

### **1.3 Landasan Hukum**

Landasan Idiil dari RPJPD Kota Padang Panjang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah direvisi, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Sumatera Tengah
8. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ/, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD Daerah dan RPJM Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18, Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang 2004-2008.

#### **1.4 Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

1. RPJPD Kota Padang Panjang disusun dengan mengacu pada RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat;
2. RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan Walikota;
3. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusinya;
4. RPJMD selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan Renstra SKPD dijadikan dasar untuk penyusunan Renja SKPD yang keduanya merupakan rencana tahunan daerah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta melakukan improvisasi seperlunya sesuai dengan kondisi dan struktur pembangunan kota, maka RPJPD Kota Padang Panjang untuk periode 2005-2025 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Landasan Hukum
1.4	Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5	Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>KONDISI UMUM DAERAH DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS</b>
2.1	Kondisi Umum Daerah dan Analisis
2.1.1	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.2	Demografi
2.1.3	Tata Ruang dan Tata Guna Lahan
2.1.4	Prasarana dan Sarana Kota
2.1.5	Sosial, Budaya dan Politik
	a. Kota Serambi Mekah
	b. Kota Pendidikan
	1) Pemerataan Pendidikan
	2) Kualitas Pendidikan
	3) Efisiensi Manajemen Pendidikan
	4) Fasilitas Pendidikan dan Ketenagaan
	a) Pendidikan Anak Usia Dini
	b) SD/MI
	c) SMP/MTs
	d) SMA/SMK/MA
	5) Pendidikan Bernuansa Islami
	c. Adat dan Budaya
	d. Kesehatan
	e. Politik
2.1.6	Ekonomi dan Sumberdaya Alam
	a. Perdagangan, Hotel dan Restoran
	b. Jasa-Jasa
	c. Pariwisata
	d. Usaha Mikro Kecil Menengah
	e. Industri
	f. Koperasi
	g. Pertanian
2.1.7	Pemerintahan
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan
	b. Organisasi Perangkat Daerah
	c. Aparatur
	d. Sarana dan Prasarana
	e. Keamanan dan Ketertiban Umum
2.2	Perubahan Lingkungan Strategis
2.2.1	Lingkungan Internal Daerah
	a. Letak Kota Semakin Strategis
	b. Rasa Ke-Islaman yang Semakin Tinggi
	c. Pelaksanaan Otonomi Daerah

	2.2.2	Lingkungan Eksternal
		a. Bandara Internasional Minangkabau
		b. Pelebaran Jalan Padang-Pekanbaru
		c. Pembangunan Jalan Sicincin-Malalak
		d. Globalisasi Perekonomian Dunia
		e. Perkembangan Pembangunan Daerah Tetangga
	2.2.3	Lingkungan Fisik
BAB III		PREDIKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025
	3.1	Prediksi Pembangunan Ekonomi
	3.2	Prediksi Pembangunan Manusia
	3.2.1	Tingkat Pendidikan
	3.2.2	Tingkat Kesehatan Masyarakat
	3.2.3	Penyediaan Lapangan Kerja
	3.2.4	Tingkat Pengangguran
	3.3	Prediksi Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah
	3.3.1	Pengembangan Tata Ruang Kota
	3.3.2	Pembangunan Wilayah
		a. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten dan Kota Sekitarnya
		b. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan
		c. Peningkatan Sarana dan Prasarana kota
BAB IV		VISI , MISI, TUJUAN DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
	4.1	Visi
	4.2	Misi
	4.3	Arah Pembangunan Daerah
	4.3.1	Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat
	4.3.2	Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian
	4.3.3	Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari
	4.3.4	Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana
	4.3.5	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	4.4	Pentahapan Pembangunan Daerah
	4.4.1	Periode Lima Tahun Pertama (2008-2013)
	4.4.2	Periode Lima Tahun Kedua (2014-2018)
	4.4.3	Periode Lima Tahun Ketiga (2019-2023)
	4.4.4	Periode Lima Tahun Keempat (2024-2028)
BAB V		PENUTUP

00000

# **Bab II**

## **KONDISI UMUM DAERAH DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Padang Panjang periode 2005-2025 disusun sedemikian rupa atas dasar beberapa pertimbangan penting. Pertimbangan pertama adalah bahwa penyusunan rumusan strategi dilakukan atas dasar hasil analisis kondisi dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh kota Padang Panjang. Pertimbangan kedua adalah dengan memahami potensi tersebut dapat dihasilkan prediksi kondisi umum daerah baik di bidang pembangunan ekonomi, pembangunan manusia maupun tata-ruang dan pembangunan wilayah. Pertimbangan ke tiga adalah dengan berpedoman pada kondisi umum serta prediksi masa depan pembangunan, dirumuskan pula visi, misi dan arah pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 20 tahun mendatang.

### **2.1 Kondisi Umum Daerah dan Analisis**

Kenyataan sampai saat ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Padang Panjang yang dilakukan selama ini telah membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa masih banyak tantangan dan permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Masih perlu dilanjutkan upaya untuk menanggulangi permasalahan dan kendala tersebut dalam rangka mendorong proses pembangunan Kota Padang Panjang ke depan dalam rangka mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu, pada tahap pertama perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang kondisi umum kota



Padang Panjang berikut beberapa perubahan yang sudah atau sedang terjadi pada lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

### **2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup**

Kota Padang Panjang secara geografis terletak antara  $100^{\circ} 20'$  dan  $100^{\circ} 30'$  Bujur Timur serta  $0^{\circ} 27'$  dan  $0^{\circ} 32'$  Lintang Selatan, merupakan dataran tinggi (daerah pegunungan) dengan ketinggian 650-850 m di atas permukaan laut, temperatur udara yang dingin berkisar antara  $18^{\circ}\text{C}$  –  $28^{\circ}\text{C}$ . Namun kota ini – sebagaimana juga halnya dengan beberapa kota lain di Provinsi Sumatera Barat - merupakan salah satu jalur aktif bencana alam, baik berupa gempa tektonik maupun gempa vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi, Singgalang, dan Tandikat.

Kota Padang Panjang dengan luas wilayah 2.300 hektar<sup>2</sup> (23 km<sup>2</sup>) terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan jumlah kelurahan sebanyak 16 kelurahan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Timur dengan Kecamatan Batipuh, Utara dan Selatan dengan Kecamatan X Koto semuanya merupakan daerah Kabupaten Tanah Datar.

Posisi Kota Padang Panjang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, antara Kota Solok dengan Kota Bukittinggi dan antara Kota Batusangkar dengan Kota Bukittinggi. Di dalam kebijakan nasional tahun 2003 mengenai kawasan Andalan dan sistem kota-kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Bukittinggi merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Padang Panjang bersama Kota Solok dan Kota Batusangkar merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun dalam perdagangan sayuran dan hortikultura lainnya Kota Padang Panjang merupakan pusat perdagangan antar wilayah. Sayuran dari Kota Solok dan Kota Batusangkar diperdagangkan di Kota Padang Panjang,

selanjutnya sampai ke kota lain di Sumatera Barat bahkan ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Berarti Kota Padang Panjang merupakan suatu pusat perdagangan sayuran regional di Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa kota ini merupakan pusat kegiatan lokal yang primer.

Sebagai daerah pegunungan dengan lahan yang relatif sempit (hanya 23 km<sup>2</sup>), Kota Padang Panjang memiliki kawasan terbangun yang cukup besar. Namun demikian masih terdapat kawasan pertanian yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura. Letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan sayuran regional dan berada di daerah lintasan antara beberapa kota di sekitarnya mengakibatkan konversi lahan cenderung meningkat dan merupakan ancaman terhadap lingkungan hidup. Agar lingkungan hidup tidak terganggu, maka pola pemanfaatan ruang yang ketat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Topografi Kota Padang Panjang bergelombang sebagai daerah pegunungan yang sejuk, cerah hujan juga tinggi. Pada tahun 2007 curah hujan tercatat 4.762 mm dengan jumlah hari hujan 268 hari. Jumlah getaran gempa pada tahun 2007 sebanyak 2.807 kali. Jumlah yang tinggi ini disebabkan oleh letak kota yang dekat dengan tiga buah gunung, yaitu Merapi, Singgalang dan Tandikek. Getaran gempa tertinggi tercatat pada bulan Maret sebanyak 1.208 kali dengan pusat di Kabupaten Tanah Datar. Gempa ini telah menyebabkan kerusakan sebagian besar bangunan di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai daerah pegunungan, sebagian Kota Padang Panjang mempunyai kelerengan yang cukup tinggi. Kondisi ini merupakan pembatas dalam penggunaan lokasi wilayah yang mempunyai kelerengan 40% ke atas, memerlukan perhatian khusus, karena pembudidayaannya akan mengganggu kestabilan debit air di wilayah hilirnya. Wilayah seperti ini lebih cocok digunakan sebagai kawasan lindung atau budidaya terbatas.

Drainase dan pembuangan air limbah sebetulnya tidak menjadi masalah bagi daerah pegunungan dengan topografi yang bergelombang seperti Kota Padang Panjang. Namun masalahnya adalah sistem drainase dan pembuangan air limbah umumnya hanya terdapat di sebagian pusat kota yang bermuara ke sungai yang ada di Kota Padang Panjang seperti Batang Air Bakarek-karek, Batang Air Putih, Sungai Andok dan Sungai Sikalambai. Air limbah tanpa diolah masuk ke dalam sungai sehingga mencemarkan air sungai.

Hutan rakyat di Kota Padang Panjang seluas 213 ha (9,26%) dari luas kota. Terbatasnya ketersediaan lahan dan perkembangan ekonomi yang cukup baik menyebabkan permintaan terhadap lahan meningkat. Jika tidak diwaspadai, sebagian ikutan bisa dikonversi menjadi kawasan budidaya. Akibatnya kelestariannya bisa terganggu dimasa depan.

Di samping itu usaha industri kapur dengan mengeksploitasi batu kapur yang berada di daerah perbukitan juga dapat mengakibatkan longsor di samping polusi industri batu kapur. Peningkatan intensitas pengelolaan batu kapur akan memberikan andil dalam kerusakan lingkungan dan meningkatnya pencemaran udara.

Jika ditinjau dari kualitas air sungai , telah terjadi penurunan kualitas air sungai, dampak negatif tersebut dapat menyebar mencapai wilayah yang cukup luas, air yang cemar tersebut tentunya akan mengalir di sepanjang daerah pengaliran sungai. Dampak lain yang dapat juga terjadi bahwa air sungai yang tercemar akan mengalir ke akuifer tanah melalui porositas tanah yang terbuka, akibatnya kondisi air tanah di sumur gali milik masyarakat yang menerima aliran air tanah yang terkontaminasi oleh air sungai tersebut akan mengalami penurunan kualitas dan tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehata masyarakat.

Selanjutnya, dilihat dari hasl penilaian status mutu air, diperoleh gambaran bahwa kondisi sebagian besar perairan tersebut sudah termasuk

kondisi mengkhawatirkan seperti Sungai Talang, Batang Sitabak, dan Batang Sibunian sudah termasuk status cemar sedang, sedangkan kualitas air Batang bakarek-karek, Parit Rumpang, Sungai Andok dan Batang Sikakeh telah termasuk status cemar berat.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Lingkungan yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan sampah, mengingat masalah sampah ini juga akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Juga dilihat dari data yang ada, maka tingkat cakupan pelayanan kebersihan di Kota Padang Panjang, setiap tahunnya selalu menalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk yang terlayani adalah sebesar 97,60 persen dari luas daerah pelayanan, dimana dari jumlah penduduk terlayani adalah sebesar 49.072, sedangkan luas daerah pelayanan adalah 2135 ha. Jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2007 adalah 122 m<sup>3</sup>/hari. Tantangan ke depan adalah bagaimana jumlah sampah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat

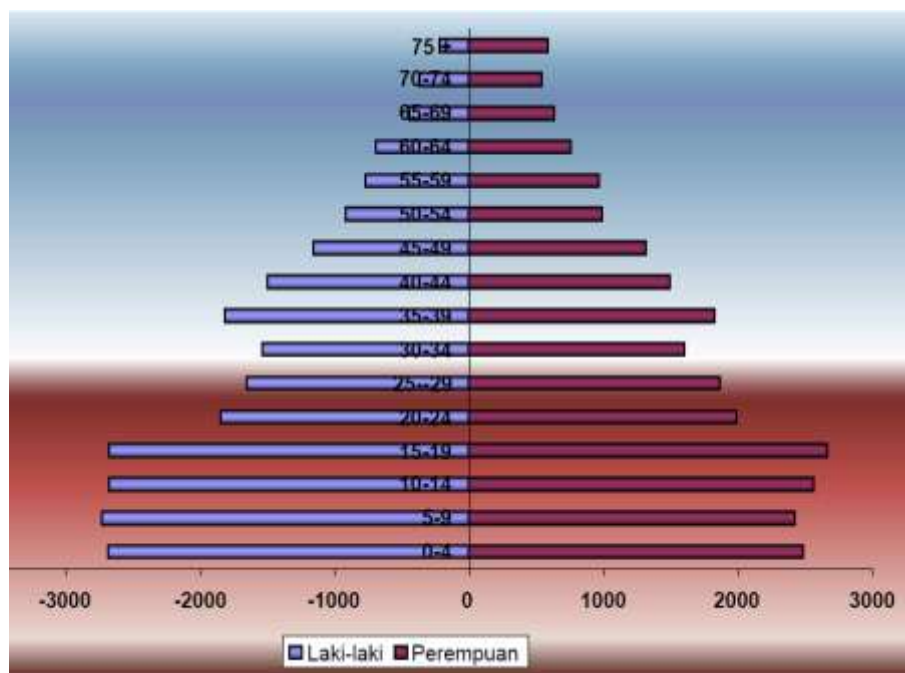
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang cukup rawan terhadap kerusakan lingkungan, baik karena bencana alam maupun karena eksploitasi oleh manusia. Kebijakan pembangunan daerah sangat perlu memperhatikan kondisi geografis.

### **2.1.2 Demografi**

Dari sisi aspek demografi, Kota Padang Panjang, termasuk salah satu kota yang pertumbuhan penduduknya termasuk ke dalam kategori pertumbuhan penduduk lambat. Laju pertumbuhan baik selama periode tahun 1980-1990, periode 1990-2000, serta periode 2000-2005, menunjukkan tendensi yang relatif rendah, berkisar antara 0,9% sampai 1,2% per tahun. Relatif rendahnya laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai konsekwensi terjadinya penurunan angka kelahiran, disertai tingginya net migrasi ke luar kota Padang Panjang.

Diperkirakan angka kelahiran sudah jauh di bawah 3,02 dari kondisi tahun 2000 menurut Sensus Penduduk, dimana pada tahun 1980 an bahkan angka kelahiran berkisar 4. Terjadinya penurunan angka kelahiran bagi pasang usia subur yang tinggal di Kota Padang Panjang, dan ini sebagian diantaranya adalah karena kemajuan pendidikan wanita serta terjadinya peningkatan kesadaran dan pengetahuan pengendalian kelahiran. Angka pencapaian keluarga berencana dapat menjangkau peserta sampai 76,6% hingga pertengahan tahun 2005; sebuah pencapaian tertinggi di Sumatera Barat (BKKBN, 2006), angka tersebut pada tahun tahun pertengahan 1980 an masih berkisar 40-50 persen.

Faktor kedua adalah semakin tingginya kesadaran dari masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dan hal ini telah menyebabkan tingginya migrasi ke luar untuk anak usia sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan, akademi dan atau universitas. Sementara migrasi masuk ke kota Padang Panjang konsentrasi pada kelompok usia pendidikan menengah. Kondisi demikian telah mengakibatkan struktur usia masyarakat menjadi ramping, dalam arti relatif proporsi kecil ditemukan pada kelompok usia yang muda dan produktif dibandingkan dengan kelompok usia pendidikan dasar dan menengah.



Gambar 2. Kohort Penduduk Kota Padang Panjang

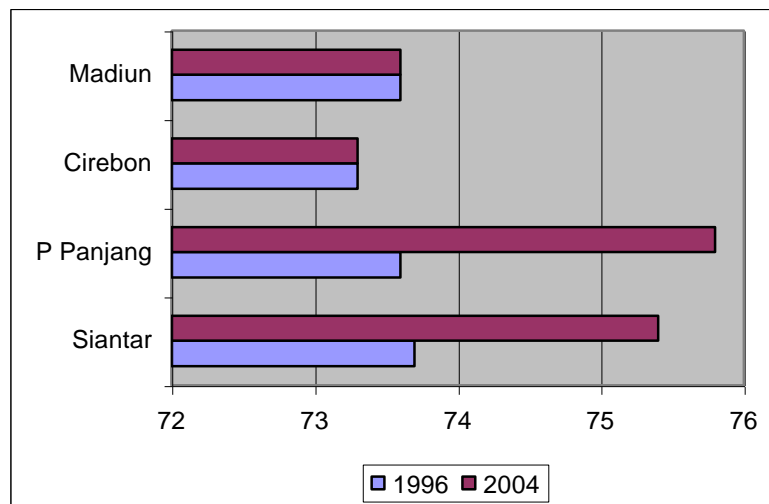
Mengingat laju pertumbuhan penduduk sedemikian itu, telah berimplikasi terhadap berbagai dimensi demografi. Pertama adalah masuknya kota Padang Panjang pada kondisi Transisi Demografi tahap akhir dan memasuki *Window of Opportunity*. Transisi demografi sudah terjadi cukup cepat di kota Padang Panjang, termasuk di sebagian besar daerah lainnya. Transisi demografi ditandai dengan tercapainya penurunan angka kelahiran menjadi sekitar 3,02 per-rumah tangga. Artinya beban keluarga yang melahirkan anak yang lebih kecil akan semakin ringan dibandingkan dengan angka kelahiran yang lebih tinggi. Saat bersamaan angka kematian bayi juga sudah menunjukkan tendensi yang menurun.

Semakin membaiknya angka kematian bayi ini, diharapkan usia harapan hidup masyarakat semakin panjang. Tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Kota Padang Panjang sudah mencapai 69,6 tahun, sedikit di bawah pencapaian kota Bukittinggi dan Sawahlunto (BPS, 2005). Komponen lainnya adalah semakin mudahnya masyarakat dalam memilih tempat tinggal melalui proses migrasi dari dan ke kota Padang Panjang. Unsur yang terakhir ini lebih terlihat semakin banyaknya warga Padang

Panjang, khususnya angkatan muda untuk pindah ke daerah lain. Dalam jangka panjang akan terjadi jumlah penduduk menjadi stabil.

Jendela demografi dimaksudkan bahwa generasi yang lahir saat ini nantinya pada tahun 2020 akan menjadi sumberdaya yang akan mengisi pembangunan. Dimana pada saat itu rasio beban ketergantungan usia muda adalah yang paling rendah. Artinya, dalam proses transisi kependudukan sebaiknya pilihan dilakukan merubah cara pandang keluarga dari memilih menghasilkan generasi yang berkualitas lebih penting dari menghasilkan jumlah anak yang sulit ditingkatkan kualitasnya. Pada periode lima sampai 10 tahun ke depan jendela demografi akan ditentukan oleh seberapa tepat investasi yang diberikan kepada pengembangan kualitas manusia.

Proses transisi demografi akan menghasilkan beban ketergantungan rumah tangga menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin banyak penduduk usia produktif yang bekerja. Dan ketika jumlah usia produktif semakin banyak, persoalan kemudian adalah bagaimana kita mampu menggiring agar produktivitas mereka dapat ditingkatkan. Hasil perhitungan secara nasional memperlihatkan jendela demografi, ditandai dengan kesempatan usia produktif untuk menghasilkan produktivitas tertinggi akan terjadi pada masa periode pembangunan 2015 sampai 2020. Keadaan tersebut akan terjadi bilamana proses pembangunan dapat mempersiapkan generasi yang akan datang.



Gambar 3. Perbaikan IPM Padang Panjang, 1996-2004

Kondisi demografi demikian direfleksikan oleh pencapaian tingkat pembangunan manusia. Tahun 2004 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang Panjang sudah mencapai angka 75,8. Pencapaian itu setingkat pencapaian kota Padang, dan menempatkan Padang Panjang termasuk ke dalam 1 dari 15 kota peringkat terbaik pencapaian indeks pembangunan manusianya, sementara tahun 1996 pencapaiannya berkisar 73,6.

Jika dibandingkan dengan beberapa kota yang setara pencapaian IPM sebelum krisis, seperti Pematang Siantar, Madiun dan Cirebon, maka kota Padang Panjang telah menunjukkan percepatan pembangunan manusia, sekalipun terjadi setelah krisis moneter. Implikasi dari temuan ini bahwa perlu penajaman pembangunan kualitas SDM pada masa yang akan datang.

### 2.1.3 Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Kota Padang Panjang di dalam RTRW Nasional dan provinsi termasuk ke dalam kawasan andalan Agam – Bukittinggi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, pariwisata, dan pertanian. Pusat utamanya terletak di Bukittinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Kota Padang Panjang

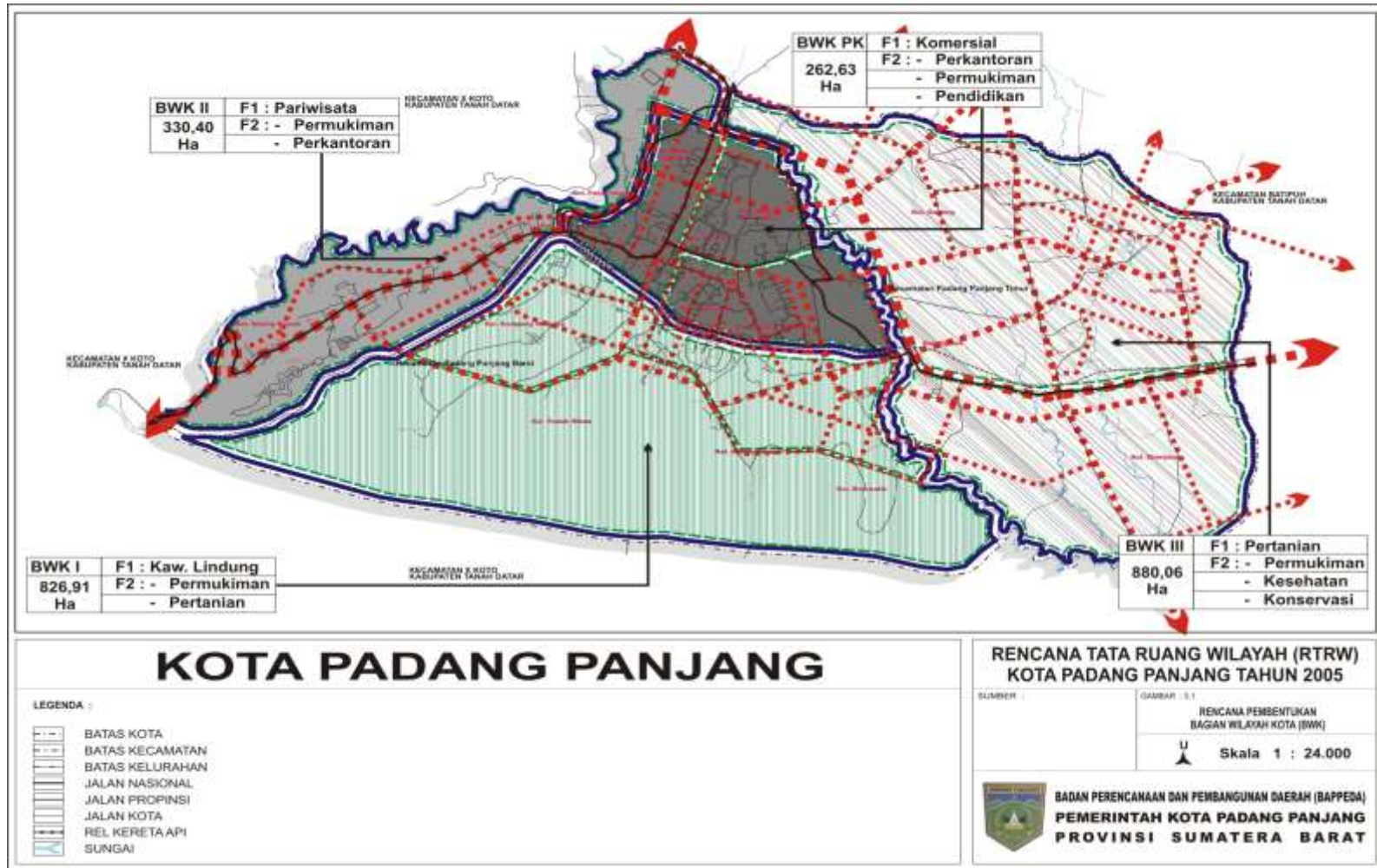


menjadi wilayah pengaruh pada Pusat Kegiatan Lingkungan orde ke I bersama kota Payakumbuh, Batu Sangkar, Lubuk Sikaping, dan Lubuk Alung. Berdasarkan wilayah pembangunan Provinsi Sumatera Barat, kota Padang Panjang termasuk ke dalam Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya kota Bukittinggi. Secara perwilayahan kota Padang Panjang dibagi atas 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu BWK Pusat Kota, BWK I, BWK II, dan BWK III.

BWK Pusat Kota difungsikan sebagai kawasan dengan fungsi utama komersial. Kegiatan pendukung kawasan ini adalah pendidikan, perkantoran, permukiman, konservasi setempat, dan sebagainya. Pada kenyataannya kawasan ini telah menjadi multi fungsi (fungsi campuran) dengan munculnya berbagai kegiatan lain. Untuk itu perlu pengendalian fungsi BWK ini pada saat ini maupun masa datang agar sesuai dengan peruntukannya.

BWK I merupakan wilayah dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung. Fungsi ruang pendukungnya adalah permukiman dan pertanian. Di wilayah ini terdapat bukit kapur yang cukup baik bagi penyerapan air. Namun bukit kapur ini juga dimanfaatkan sebagai usaha batu kapur oleh masyarakat. Untuk itu perlu pengendalian pemanfaatan bukit kapur ini secara lebih ketat sesuai dengan peruntukan ruangnya. Jika tidak terkendali, maka bukit ini bisa longsor.

Gambar 6. Pembagian BWK



BWK II merupakan bagian wilayah dengan fungsi primer pariwisata. Wilayah ini didukung dengan fungsi permukiman dan perkantoran. Karakteristik wilayah pembatas adalah Kabupaten Tanah Datar, Jl. Prof. Hamka, dan rel Kereta Api yang membentang dari Timur ke Selatan. Potensi wisata yang diunggulkan adalah kondisi alam, pusat dokumentasi dan kebudayaan Minangkabau, dan kerajinan kulit. Potensi ini masih perlu dikembangkan, dan secara spesifik perlu dikembangkan wisata religius sesuai dengan visi dan prediket kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah.

BWK III merupakan wilayah dengan fungsi primer pertanian, didukung oleh fungsi permukiman, kesehatan, dan konservasi. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di bagian Utara, Timur, dan selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai. Kecendrungan perluasan kota berada di wilayah ini, sehingga masalah alih fungsi lahan akan terjadi. Justru itu perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan luas lahan yang akan dialihfungsikan dan lahan konservasi.

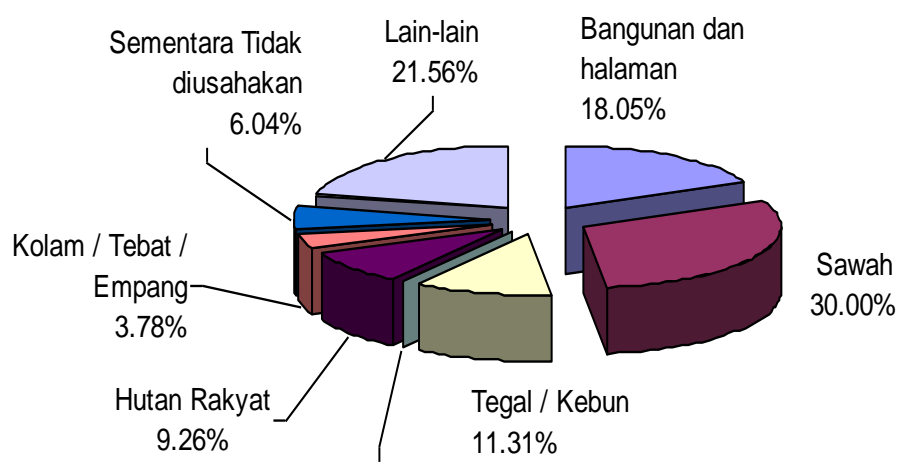
Dalam hal struktur kota, fungsi pemerintahan utama berupa Kantor Walikota ditempatkan di BWK Pusat kota. Sedangkan fungsi sekunder berupa kantor dinas/instansi ditempatkan di seluruh kota. Berdasarkan eksisting yang ada, kondisi ini dipertahankan, walaupun struktur ini juga mempunyai kelemahan terutama dalam koordinasi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Kawasan perdagangan primer terdapat di di BWK Pusat Kota dan fungsi sekundernya berada di setiap kawasan permukiman. Skala perdagangan di pusat kota, terutama sayuran, sudah merupakan skala perdagangan regional, walaupun fungsi pelayanan kota Padang Panjang dalam tata ruang Sumatera Barat sebagai skala pelayanan lokal. Sementara itu perdagangan lokal di kawasan permukiman kondisinya belum berkembang dengan baik. Jadi perlu ditingkatkan lagi di masa datang.

Perumahan tersebar di seluruh wilayah kota, baik perumahan konvensional maupun perumahan yang dibangun oleh developer secara terencana. Kebutuhan perumahan yang dibangun secara terencana sudah mendesak karena makin bertambahnya permintaan terhadap rumah. Di samping itu perumahan konvensional juga dilakukan di setiap kawasan permukiman.

Pariwisata dikembangkan di BWK I yang merupakan kawasan lindung berupa wisata alam. Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan wisata juga harus memperhatikan kelestarian hutan lindung. Justru itu peluang untuk mengembangkan wisata religius makin terbuka di kota Padang Panjang. Lokasi wisata religius bukan saja di kawasan alam yang asri tetapi juga bisa dilakukan pada berbagai objek seperti pendidikan yang islami, rumah sakit yang islami, dan lain-lain.

Ruang terbuka hijau yang diarahkan di BWK I saat ini cukup dominan dalam penggunaan lahan. Jenis ruang terbuka hijau berupa kawasan olah raga pacuan kuda, kawasan konservasi setempat di sekitar aliran sungai, kawasan lindung, dan kawasan pertanian. Seiring dengan alih fungsi lahan luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Untuk itu penetapan luasan kawasan hijau di masa datang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kota terhadap ruang terbuka hijau.

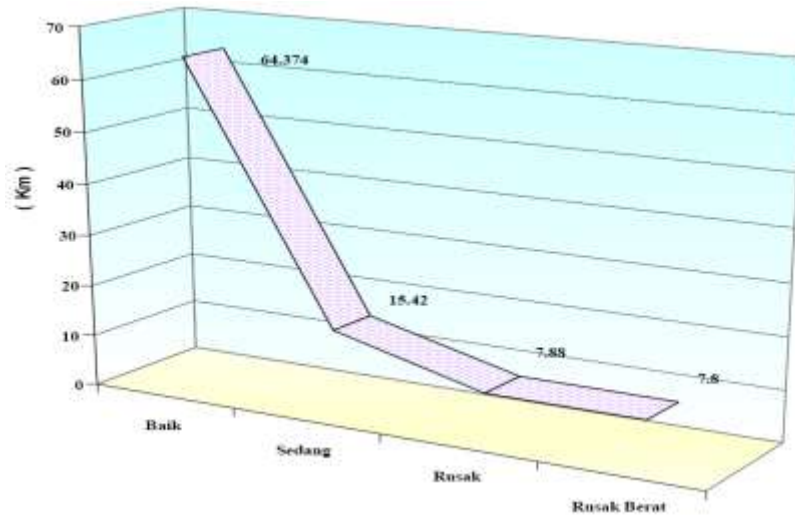


Gambar 7. Persentase Penggunaan Lahan Kota Padang Panjang

#### **2.1.4 Prasarana dan Sarana Kota**

Prasarana transportasi Kota Padang Panjang, sesuai dengan letaknya di daerah lintasan antar kota di Sumatera Barat, terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Jalan arteri yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah jalan yang menghubungkan Kota Padang Panjang dengan Kota Bukittinggi sebagai pendukung pergerakan regional dengan lalu lintas langsung (*through traffic*). Jenis kendaraan yang melintas di jalan ini tidak terbatas ukurannya. Kondisi jalan arteri ini cukup baik untuk mendukung pergerakan lalu lintas di atasnya. Namun demikian seiring dengan makin meningkatnya lalu lintas pada ruas jalan ini, di masa datang perlu ditambah ruas jalan terutama di sebelah Barat dan Utara kota. Jalan kolektor yang menghubungkan Kota Padang Panjang dengan Kota Solok dan Tanah Datar dan ibu kabupaten kondisinya perlu ditingkatkan lagi. Di samping itu jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kota Padang Panjang dengan pusat-pusat kegiatan dan permukiman juga perlu ditingkatkan kondisinya.

Jalan lokal yang ada di Kota Padang Panjang saat ini kondisinya masih memerlukan peningkatan kuantitas berupa panjang jalan dan kualitasnya. Peningkatan kuantitas dan kualitas ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan akses dari pusat permukiman ke pusat kegiatan lokal menjadi lebih mudah. Sedangkan kondisi infra struktur lainnya seperti air minum, listrik, dan telepon masih terbatas. Sebagai kota pegunungan Padang Panjang memiliki sumber air bersih yang bisa ditingkatkan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan warga kota dan sekitarnya. Potensi listrik dan telepon juga masih bisa ditingkatkan kapasitasnya.



Gambar 5. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan

Jalan di kota Padang Panjang terdiri dari jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Di antara jenis jalan tersebut yang mendesak untuk ditambah dan ditingkatkan adalah jalan lokal, karena kondisinya yang masih belum baik. Di samping itu jalan arteri dan kolektor juga perlu ditambah sejalan dengan rencana pengembangan infrastruktur kota.

Jasa pendidikan yang tersedia cukup beragam di Kota Padang Panjang mulai dari tingkat SD sampai SLTA. Pendidikan berbasis agama yang sudah ada di kota Padang Panjang sudah dikenal sejak lama baik dalam lingkup regional bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan juga sangat beragam dari yang semi permanen sampai permanen. Justru itu masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan.

Kuantitas prasarana dan sarana kesehatan relatif banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk. Berarti tantangan bagi prasarana dan sarana kesehatan Kota Padang Panjang di masa depan adalah peningkatan aspek kualitas. Sebagai kota lintasan yang memiliki intensitas pergerakan lalu lintas yang tinggi, Kota Padang Panjang berpotensi menjadi penyedia prasarana dan sarana kesehatan bagi perawatan akut seperti kecelakaan lalu lintas.

### **2.1.5 Sosial, Budaya dan Politik**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang Panjang 2004-2008 telah dipilih tiga sektor utama yang akan menjadi fokus pembangunan kota. *Pertama* adalah pengembangan kualitas pendidikan, *Kedua* pengembangan ekonomi rakyat yang mandiri dan *Ketiga*, pengembangan kualitas pelayanan kesehatan. Fokus demikian diarahkan pada pelayanan yang bernuansa Islami, dan menjadi satu satunya daerah perkotaan yang akan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan berdasarkan syariat Islam. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia.

Secara umum dapat dilihat bagaimana penampilan dari kualitas sumberdaya manusia yang tinggal di Padang Panjang. Indikator utama yang digunakan adalah nilai *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM). Analisis dari data yang ada semenjak tahun 1996 sampai tahun 2004 menunjukkan tendensi yang semakin meningkat, bahkan pada tahun 2004 pencapaian indeks IPM di Padang Panjang bahkan telah menempatkan kota ini menjadi kota rangking 13 di Indonesia. Namun demikian, pencapaian IPM merefleksikan ketercapaian pembangunan manusia secara minimum, dalam hal aksesibilitas pendidikan, kelangsungan hidup masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Persoalan berikutnya adalah bagaimana pencapaian IPM terintegrasi dengan konsep pengembangan mutu manusia yang lebih holistik, dengan arti dikembangkannya unsur emosional dan spritual, dan terkait dengan visi kota.

#### **a. Kota Serambi Mekah**

Padang Panjang memang sebuah kota kecil, namun memiliki sejarah yang cukup berarti, terutama dalam pendidikan agama Islam. Dari fakta sejarah dapat diungkap bahwa di kota ini berdiri madrasah-madrasah antara lain Diniyah School (1915), Sumatera Thawalib (1918), Thawalib Gunung (1921), Perguruan Diniyah Putri (1923), Kulliyatul Muballighin

Muhammadiyah (1930) dan lain-lain yang melaksanakan pendidikan secara modern pada masa itu. Madrasah-madrasah tersebut didatangi oleh pelajar dari berbagai penjuru, tidak hanya dalam wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau pada saat itu, tetapi juga dari luar Minangkabau.

Dari madrasah-madrasah yang sudah disebutkan didirikan pula madrasah-madrasah sejenis sebagai cabang dari madrasah yang telah ada di berbagai tempat oleh alumni mereka yang pernah belajar pada madrasah tersebut. Disamping itu, di kota ini juga bermunculan ulama yang cukup terkenal dan sangat peduli dengan kemaslahatan umat seperti Buya Hamka, Zainuddin Labay El-Yunusy, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Syuib Al-Yutisi dan Syahbuddin Imam Kayo. Dengan spesifikasi kesejarahan yang dimiliki Padang Panjang itu, maka kota ini dijuluki dengan *Kota Serambi Mekah*.

Namun, sejalan dengan perkembangannya Citra Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah telah mengalami pasang surut. Pudarnya citra Serambi Mekah kelihatannya cukup disadari oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Berbagai cara telah dilakukan untuk membangkitkan kembali citra tersebut, dan pada tanggal 21 Maret 1990 dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kodya Dati II Padang Panjang Nomor 2/DPRD/PIM/III/1990 tentang Pemberian Julukan/Akronim Padang Panjang Kota Serambi Mekah.

Selanjutnya pada Tahun 1993 diupayakan pula "*mambangik batang tarandam*" (menghidupkan kembali citra yang lama) dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 13/WAKO-PP/1993 tentang Pedoman Pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekah.

Beberapa kegiatan keagamaan dalam rangka pengisian dan penyemarakan Kota Serambi Mekah antara lain : Himbuan penggunaan/pemakaian jilbab bagi seluruh wanita muslim, termasuk anak-anak sekolah.



Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya yang bersifat islami, pemberian bantuan kepada garin masjid dan Mushalla setiap bulannya, Pemberian bantuan guru TPA/TPSA, Pelaksanaan Apel Didikan Subuh secara berkesinambungan, Pelaksanaan Pesantren dan Tim Ramadhan secara berkelanjutan, Perwujudan Anak-anak usia sekolah melek huruf Al Qur'an, Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan pada setiap sekolah dan kantor seperti mushallah dan label-label keagamaan serta memperhatikan waktu shalat dalam melaksanakan kegiatan keseharian.

Meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan/sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan dan non keagamaan secara berkesinambungan, Peningkatan fungsi Mesjid dan Mushalla sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, Penetapan Perda Pekat dan Perda Pengelolaan Zakat.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana terus mengupayakan penyemarakan pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekah dengan berbagai aktifitas keagamaan, dalam artian bukan hanya dalam bentuk simbol-simbol, melainkan juga dalam berbagai aplikasi kehidupan nyata sehari-hari, Sehingga Penamaan Srambi Mekah merupakan suatu julukan yang diharapkan dapat menggambarkan identitas atau ciri khusus yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang.

## **b. Kota Pendidikan**

### **1) Pemerataan Pendidikan**

Satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk melihat pemerataan pendidikan sejauh ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), yang dihitung dengan formulasi yaitu perbandingan antara jumlah siswa yang tercatat di sekolah dengan penduduk usia sekolah sekolah di jenjang tersebut. Sampai dengan tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar pendidikan kota Padang Panjang sudah melebihi 100% di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimana untuk SD/MI 104,38%, di jenjang SMP/MTs

140,58% dan di jenjang SMA/SMK/MA sebesar 172,55%. Besaran angka ini menggambarkan bahwa jumlah anak yang bersekolah di jenjang pendidikan formal sudah melebihi dari jumlah penduduk usia sekolah kota Padang Panjang. Selisih lebih jumlah siswa ini merupakan kontribusi dari siswa yang berasal dari luar kota Padang Panjang, baik dari daerah interland maupun dari berbagai daerah lain dan negara tetangga di sekolah swasta dan agama. Bahkan khusus di jenjang SMA/SMK/MA angkanya sudah sangat besar melebihi 150% yang berarti jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tersebut sudah hampir sama antara siswa yang berasal dari kota Padang Panjang dengan yang berasal dari luar Padang Panjang. Tendensi ini sudah memperlihatkan bahwa ada kecenderungan Padang Panjang sudah dijadikan sebagai Kota Tujuan Pendidikan, kasar (APK) pendidikan yang sudah berada di atas 100%, yang menunjukkan tekanan permintaan bangku sekolah di kota Padang Panjang dari masyarakat luar Padang Panjang mempunyai tendensi meningkat.

Walaupun demikian, dari sisi Angka Partisipasi Murni (perbandingan antara jumlah siswa asal Padang Panjang yang berada di satu jenjang sekolah dibanding dengan penduduk Padang Panjang usia sekolah di jenjang tersebut) untuk usia 7-18 tahun Padang Panjang masih memerlukan berbagai upaya sehingga bisa dipastikan tidak satupun penduduk Padang Panjang usia pendidikan tersebut yang tidak mengenyam pendidikan, baik di lembaga persekolahan ataupun di lembaga pendidikan non formal (kelompok belajar paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA). Sampai dengan tahun 2007 di Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD/MI sudah mencapai 98,24 %, di jenjang SMP/MTs sebesar 96,15% dan di jenjang SMA/SMK/MA sebesar 97,67%. Angka-angka ini menunjukkan APM Padang Panjang sudah hampir mendekati *universal education* (98,3%), namun untuk memberikan penjaminan bahwa tidak ada penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah diperlukan sebuah upaya dalam bentuk program wajib belajar 12 tahun, sehingga APM ini bisa mencapai 100%. Program ini secara langsung juga akan memberi sumbangan dari sisi lama

pendidikan, dengan angka rata-rata lama sekolah penduduk Padang Panjang (pengolahan data secara manual) yang sudah mencapai 11,64 tahun menggambarkan bahwa cukup tingginya kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Panjang.

## **2) Kualitas Pendidikan**

Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan, namun secara umum lebih banyak diacu kepada nilai ujian akhir, baik Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Pada tahun 2007 rata-rata nilai UAN kota Padang Panjang bervariasi, yakni SD sebesar 7,13 dan SLTP sebesar 5,75. Tingkat SLTA IPA sebesar 6,83, sedangkan untuk SLTA IPS sebesar 6,99. Secara keseluruhan rata-rata nilai UAN kota Padang Panjang memang masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan angka Rata-rata nilai UAN Provinsi Sumatera Barat, ternyata nilai rata-rata UAN di Kota Padang Panjang tahun 2007 berada di bawah rata-rata nilai UAN Provinsi Sumatera Barat, kecuali untuk SLTA IPS tahun 2007 mampu melebihi rata-rata nilai UAN Sumbar. Untuk ini dalam jangka panjang diperlukan berbagai upaya secara terus menerus di bidang pendidikan baik dalam bentuk memacu pemenuhan standar pendidikan seperti standar kurikulum, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar tenaga kependidikan dan lain-lain

## **3) Efisiensi Manajemen Pendidikan**

Efisiensi pendidikan salah satunya dapat dilihat dari angka kelulusan, sekalipun masih belum mencapai angka 100% di semua jenjang pendidikan, namun secara umum sudah cukup baik, dimana pada tahun 2007 angka kelulusan di jenjang SD/MI sebesar 99,47 %, SMP/MTs sebesar 82,51%, dan SMA/SMK/MA sebesar 86,61%.

Di samping itu efisiensi pendidikan dapat dilihat dari sisi besaran angka mengulang. Sejauh ini khususnya di SD/MI dan SMP/MTs angka mengulang kota Padang Panjang masih cukup besar yaitu 8,73% di jenjang

SD/MI. 1,08% di jenjang SMP/MTs, dan 1,04% di jenjang SMA/SMK/MA. Dengan proses pembelajaran yang semakin membaik diyakini bahwa tahun-tahun mendatang angka mengulang ini dapat ditekan seminimal mungkin.

#### **4) Fasilitas Pendidikan dan Ketenagaan**

Secara keseluruhan fasilitas dasar pendidikan dan ketenagaan pendidikan sudah cukup memadai. Untuk jangka panjang hal yang diperlukan adalah pembenahan-pembenahan termasuk melengkapi sarana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pembelajaran itu sendiri.

##### **a) Pendidikan Anak Usia Dini**

Ada dua jalur pendidikan usia dini yang dikenal saat ini yaitu melalui jalur formal di Taman Kanak-Kanak dan jalur non formal dalam bentuk lembaga PAUD termasuk Taman Penitipan Anak dan Kelomok Bermain. Samapi dengan Tahun 2007 Pemerintah Kota Padang Panjang telah membangun 16 lembaga PAUD Percontohan yang ditempatkan masing-masingnya 1 lembaga di setiap kelurahan. Pengelolaan lembaga PAUD Percontohan ini berikutnya diserahkan kepada masyarakat melalui PKK masing-masing kelurahan. Di samping itu juga telah ada sebanyak 15 lembaga PAUD milik masyarakat, yang secara total telah mampu melayani 630 orang anak pada tahun 2007. Dengan bantuan peralatan APE dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pengelola melalui kegiatan magang ke PAUD Istiqlal Jakarta, maka pengembangan PAUD bernuansa islami merupakan komitmen yang mesti dilanjutkan untuk jangka panjang.

Di jalur PAUD formal, Padang Panjang juga telah memiliki TK Negeri Pembina yang berlokasi di kelurahan Kampung Manggis yang secara bertahap akan dikembangkan sebagai TK rujukan baik dari sisi proses maupun manajemen kelembagaan di kota Padang Panjang. Di samping itu sampai dengan Tahun 2007 di Padang

Panjang telah berdiri 13 Taman-Kanak milik berbagai yayasan dengan melayani sebanyak 914 orang anak dan dilayani sebanyak 102 orang guru serta memiliki ruang kelas sebanyak 50 ruang berikut perlengkapan pembelajaran lainnya. Mengingat masa kanak-kanak adalah usia emas (golden age), maka untuk jangka panjang perhatian terhadap pendidikan anak usia dini tetap mesti dilanjutkan dan ditingkatkan.

#### **b) SD/MI**

Secara umum rasio rata-rata siswa per kelas di SD/MI kota Padang Panjang telah mencapai kondisi ideal, dengan rasio 26 sampai dengan 27 siswa per kelas, kecuali di SD Komplek Balai-Balai dan Guguk Malintang yang berkisar 30 orang per kelas disebabkan karena SD tersebut berada di pusat kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Pada Tahun 2007 di Padang Panjang terdapat 39 SD/MI dengan rincian 37 SD dan 2 MI. Dari 37 SD yang ada 33 adalah SD Negeri dan 4 SD swasta, sedangkan MI keduanya merupakan milik swasta. Jumlah siswa yang dilayani sebanyak 6.645 orang dengan jumlah guru sebanyak 452 orang. Dengan ruang kelas sejumlah 260 ruang, maka kondisi saat ini sudah cukup memadai. Namun untuk jangka panjang, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lainnya, kemungkinan penambahan sekolah bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

#### **c) SMP/MTs**

Tuntutan yang tinggi dari masyarakat pada peningkatan jumlah SMP tiga tahun terakhir di kota Padang Panjang menyebabkan terjadinya penambahan sekolah. Tahun 2007 jumlah SMP/MTs di kota Padang Panjang sebanyak 16 sekolah dengan perincian SMP Negeri 5, SMP swasta 5, MTs Negeri 1, dan MTs swasta 5 dengan jumlah total siswa sebanyak 4.271 orang. Untuk melayani siswa sejumlah demikian tersedia ruang kelas sebanyak 142 ruang dan

tenaga guru sebanyak 531 orang. Dalam kerangka pengembangan jangka panjang, pengembangan SMA/MTs akan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas melalui peningkatan sarana pembelajaran serta peningkatan mutu guru.

#### **d) SMA/SMK/MA**

Dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang melebihi 150%, tuntutan terhadap ketersediaan jumlah SMA/SMK/MA semakin tinggi di Padang Panjang. Saat ini di Padang Panjang terdapat 20 SMA/SMK/MA dengan rincian SMA Negeri sebanyak 3 sekolah, SMA swasta sebanyak 4 sekolah, SMK Negeri sebanyak 2 sekolah, SMK swasta sebanyak 3 sekolah, MA Negeri sebanyak 2 sekolah dan MA swasta sebanyak 3 sekolah, dengan jumlah siswa yang dilayani sebanyak 5.949 orang, jumlah ruang kelas sebanyak 223 ruang dan jumlah guru sebanyak 758 orang. Tingginya minat masyarakat luar Padang Panjang untuk bersekolah di Padang Panjang, maka untuk jangka panjang di samping terus memacu peningkatan mutu, kemungkinan penambahan sekolah akan sangat diperlukan, khususnya sekolah menengah kejuruan.

#### **5) Pendidikan Bernuansa Islami**

Perjalanan waktu secara jelas telah menggambarkan bahwa Padang Panjang sudah didatangi oleh banyak orang dari berbagai daerah dan bahkan manca negara untuk menuntut ilmu. Padang Panjang telah lama dikenal sebagai pusat perkembangan pendidikan Islam. Kehadiran Perguruan Thawalib, Kauman Muhammadiyah, Diniyah Puteri Rahmah El Yunusiyah, MIN Adam BB, dan kehadiran beberapa tokoh yang pernah menjalani pendidikan di Kota Padang Panjang seperti Hamka, M. Natsir, Rahmah El Yunusiyah di pentas internasional cukup memberi bukti tentang eksistensi Kota Padang Panjang sebagai pusat perkembangan Islam. Banyak indikator yang dapat dijadikan kekhususan pendidikan kota Padang Panjang dibanding dengan daerah lain, selain dari sisi kualitas yang terus meningkat, ciri utama warna keislaman harus tetap

dipertahankan dan dikembangkan, konsep mana di daerah tidak akan didapatkan oleh peserta didik. Motto unggul dalam IPTEK kukuh dalam IMTAQ diharapkan menjadi utama lulusan berbagai lembaga pendidikan di kota Padang Panjang. Ditingkat masyarakat hal demikian juga mesti dikembangkan, apabila dijenjang persekolahan konsep melek huruf latin dan Alquran dengan mengembangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya serta Bahasa Arab, maka guna menjamin kukuhnya kota Padang Panjang sebagai kota yang islami, perlu dilakukan berbagai upaya yang menjamin tiada masyarakat muslim Padang Panjang yang buta tulis baca Alquran, karena dengan demikian sendi-sendi keislaman dapat terus dipelihara dan ditegakan.

### **c. Adat dan Budaya**

Masyarakat kota Padang Panjang memiliki budaya Minangkabau, dengan relatif adanya penonjolan pada unsur-unsur beragama, dan menjadikan daerah ini sebagai salah satu kota yang mempunyai harmonisasi yang baik antara agama dengan adat dan budaya. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah dan mufakat adalah sebagai sesuatu yang lazim dan merupakan modal budaya untuk pembangunan kota pada masa yang akan datang. Struktur kelembagaan adat di tiga nagari (Gunung, Bukit Surungan, dan Lareh Nan Panjang) dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengatur secara menyeluruh tentang posisi masyarakat secara adat. Sejauh ini KAN telah menjalankan tugas yang terus mengupayakan agar masyarakat dapat hidup dalam tatanan kehidupan beradat dengan sendi keagamaan berfilosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Harus diakui, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ikut mempengaruhi nilai-nilai adat yang tertanam dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai luhur seperti kekerabatan, kegotongroyongan, dan toleransi secara perlahan terabrasi. Mengingat adat dan budaya luhur merupakan sendi kehidupan masyarakat Minangkabau termasuk di kota Padang Panjang, maka untuk jangka panjang perlu dirancang suatu upaya yang

tersistematis yang memungkinkan nilai-nilai adat dan budaya tersebut terpelihara dan diwariskan kepada generasi muda Padang Panjang sehingga masyarakat kota Padang Panjang dapat hidup dalam sebuah era kemajuan dengan tetap bersendikan kepada nilai-nilai adat dan budaya luhur yang telah tertanam dan di tengah masyarakat sebagai sebuah ciri masyarakat Minangkabau.

#### **d. Kesehatan**

Kesehatan merupakan unsur yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam pencapaian peningkatan IPM di Kota Padang Panjang. Dengan kondisi kota yang berada pada kondisi geografis dengan udara yang sejuk, pemandangan yang indah serta berada di posisi perbatasan antara kota Batusangkar, Bukittinggi, Solok, memungkinkan pengembangan pelayanan kesehatan di kota Padang Panjang kearah pusat rujukan kesehatan pernafasan/respirasi dan wisata kesehatan. Hal ini didukung dengan telah beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang baru pada akhir tahun 2007, maka secara bertahap dilakukan peningkatan mutu pelayanan, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditentukan.

Untuk dapat mewujudkan Pelayanan kesehatan yang prima disemua unit layanan, baik Rumah sakit maupun Puskesmas, harus didukung dengan tersedianya SDM yang profesional, sarana prasarana kesehatan yang representatif serta pengelolaan manajemen yang handal. Di bidang peningkatan mutu pelayanan, pada akhir tahun 2007 telah dilaksanakan proses persiapan untuk penilaian Akreditasi Rumah Sakit, dimana diharapkan nantinya RSUD sudah lulus penilaian Akreditasi dengan terpenuhinya semua yang disyaratkan. Selain itu di Puskesmas (3 Puskesmas) harus disusun Standar Pelayanan Minimum, mengingat standar pelayanan merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Salah satu bukti peningkatan mutu pelayanan adalah angka kunjungan. Dimana kecenderungan angka kunjungan pasien cukup tinggi baik kunjungan penduduk dalam kota maupun luar kota. Hampir 40 % kunjungan pasien ke RSUD berasal dari luar kota Padang Panjang. Jika dilihat lagi dari data terjadi peningkatan angka kunjungan dari tahun 2006 yang berjumlah 39.853 orang menjadi 43.815 orang di tahun 2007. Hal ini membuktikan bahwa mutu pelayanan di RSUD sudah dianggap baik. Sedangkan angka kunjungan total di 3 Puskesmas pada tahun 2007 adalah 49.723 orang yang jauh meningkat dari tahun 2006 sebesar 39.307 orang.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara umum di Kota Padang Panjang, baik di Puskesmas maupun RSUD, tidak terlepas dari dukungan SDM yang handal, untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan bagi SDM kesehatan. .

Selain itu kondisi sarana prasarana serta kelengkapan peralatan kedokteran yang canggih di Rumah Sakit sangat mendukung untuk terwujudnya Rumah Sakit sebagai Pusat rujukan pelayanan kesehatan dengan kekhususan di bidang respirasi/pernafasan. Mengingat kondisi geografis yang sangat mendukung serta belum adanya rumah sakit lain di Sumatera dengan kekhususan yang sama. Pada tahun 2006 kondisi peralatan di RSUD baru mencapai 38 % dari seluruh peralatan yang harus ada untuk tercapainya tujuan Akreditasi pelayanan serta pusat rujukan respirasi. Hal ini meningkat menjadi 40 % di tahun 2007 dengan penambahan beberapa item alat dan diharapkan di akhir tahun 2013 nanti dapat tercapai kelengkapan alat sesuai dengan visi misi RSUD.

Selain dari target pencapaian diatas, indikator lain untuk menilai peningkatan mutu pelayanan adalah melalui penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil serta cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit. Pada tahun 2006 terjadi kematian bayi 12 orang dari 873 persalinan, dan hal dapat ditekan dimana pada tahun 2007

terdapat penurunan kematian menjadi 8 orang dari 819 kali persalinan. Sedangkan angka kematian ibu hamil pada tahun 2006 dan 2007 adalah 0 % dimana hal ini berarti tidak terdapat kematian pada ibu yang diakibatkan oleh melahirkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan dengan angka cakupan pelayanan kesehatan juga terjadi peningkatan, dimana tahun 2007 cakupan pelayanan mencapai 83,30 % meningkat dari tahun 2006 yang hanya 78,70 %.

Hal ini juga didukung dengan semakin lengkapnya sarana kesehatan yang sudah merata di 2 (dua) kecamatan, yaitu dengan jumlah Puskesmas sebanyak 3 unit, Puskesmas Pembantu 7 unit, dan Posyandu sebanyak 90 unit. Dengan kelengkapan sarana kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan serta berimbas pada umur harapan hidup masyarakat yang juga meningkat . Pada tahun 2007 angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang mencapai 69,8 tahun dan diharapkan tahun 2013 dapat mencapai 71,2 tahun.

#### **e. Politik**

Dimensi politik dapat dilihat dari berkembangnya fungsi-fungsi piranti partai politik. Dimana semenjak terjadinya perubahan tatanan pemerintahan menuju desentralisasi, telah pula terlaksana proses pemilihan umum yang demokratis. Kepemimpinan di daerah saat ini sudah melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat.

#### **2.1.6 Ekonomi dan Sumberdaya Alam**

Struktur perekonomian Padang Panjang, didominasi oleh dua kegiatan ekonomi utama yaitu Pengangkutan dan Komunikasi serta Jasa-jasa dengan kontribusi masing-masingnya dalam PDRB tahun 2005 sebesar 20,45 % dan 26,04 %. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Industri Pengolahan yang juga merupakan kegiatan cukup penting bagi

kehidupan Kota Padang Panjang dengan kontribusi masing-masingnya sebesar 11,69 % dan 10,19 %. Sedangkan kegiatan pertanian kelihatannya masih cukup penting dalam kegiatan ekonomi Kota Padang Panjang dengan kontribusi sebesar 11,48%. Tabel 1 memberikan uraian rinci kontribusi untuk masing-masing sektor dalam PDRB Kota Padang Panjang.

Tabel 1.  
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Padang Panjang 2001-2005

<b>No</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>PDRB 2001 (Rp. Juta)</b>	<b>PDRB 2005 (Rp. Juta)</b>	<b>Distribusi 2005 (%)</b>	<b>Pertumbuhan 2001-2005 (%)</b>
1.	Pertanian	29.833	35.725	11,5	4,6
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.664	1.368	0,4	-21,8
3.	Industri Pengolahan	26.994	31.710	10,2	4,1
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.498	7.770	2,5	9,0
5.	Bangunan	16.987	22.504	7,2	7,3
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	31.575	36.370	11,7	3,6
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	50.641	63.622	20,5	5,9
8.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	22.607	31.080	10,0	8,3
9.	Jasa-Jasa	66.603	81.017	26,0	5,0
10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	254.402	311.166	100,0	5,2

Struktur perekonomian Kota Padang Panjang yang demikian menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan dan jasa merupakan dua kegiatan utama yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi kota. Sedangkan kegiatan perdagangan dan industri pengolahan merupakan dua kegiatan ekonomi berikutnya yang juga memegang peranan penting di Kota Padang Panjang. Bahkan sektor pertanian ternyata juga masih cukup penting, walaupun dalam jangka panjang sektor ini diperkirakan

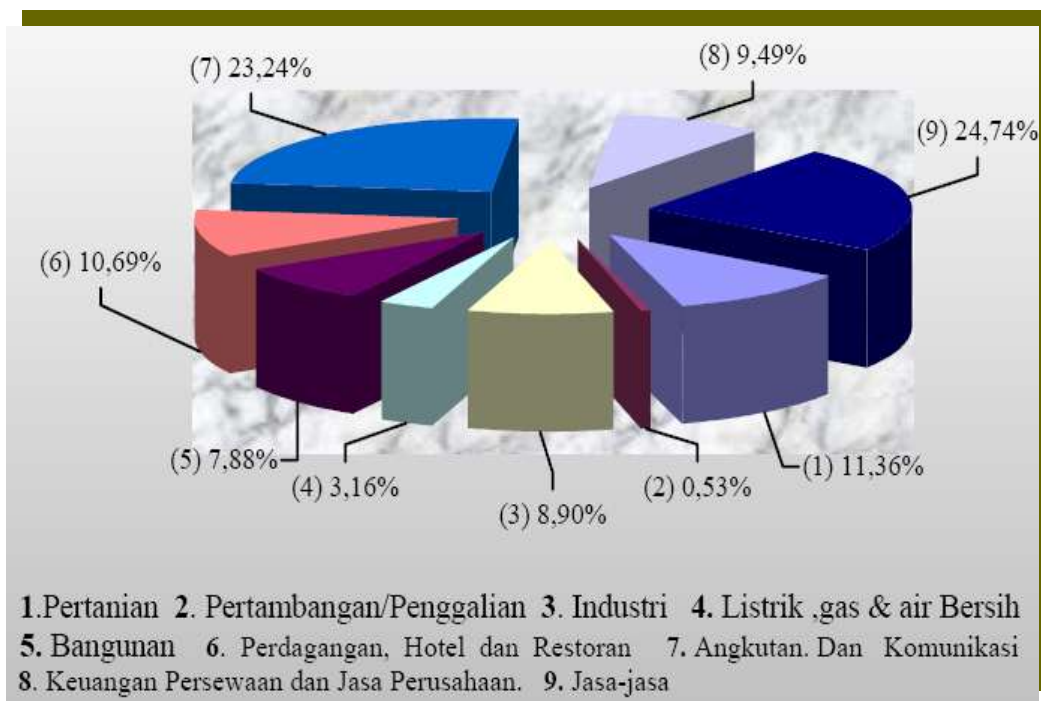
akan menurun karena semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk daerah pemukiman dan pertokoan.

Struktur perekonomian kota ini ternyata tidak hanya tergantung kepada satu kegiatan ekonomi saja, sehingga penampilan perekonomian kota masih berada dalam kondisi yang tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh guncangan ekonomi makro nasional. Perekonomian kota juga ditandai oleh relatif tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki daerah pada industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan peternakan, serta pengolahan batu kapur.

Setelah terjadinya Krisis Moneter yang berlanjut dengan Krisis Ekonomi nasional pada tahun 1997 dan 1998 terjadi kemunduran ekonomi yang sangat drastis dalam periode dua tahun tersebut. Akan tetapi, kemudian secara bertahap telah terjadi proses pemulihan kembali perekonomian (*recovery*) yang cukup berarti. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang yang mulai meningkat secara perlahan-lahan dan mencapai rata-rata 5,2 persen setiap tahunnya dalam periode 2001-2005. Dibandingkan dengan kondisi perekonomian sebelum terjadinya Krisis Ekonomi, sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi ini masih relatif rendah karena laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada periode 1993-1996 pernah mencapai rata-rata 7% setiap tahunnya.

Selanjutnya, bila dilihat pertumbuhan ekonomi dalam periode 2001-2005 menurut lapangan usaha, ternyata sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata adalah: Keuangan (8,3%), Bangunan (7,3%) Pengangkutan dan Komunikasi (5,9%) serta Listrik dan Air Bersih (9,0%). Berkembang cepatnya sektor listrik, air minum serta sektor bangunan adalah karena didorong oleh pertumbuhan kota Padang Panjang yang sejak tahun 2001 mulai membaik kembali. Sedangkan pertumbuhan sektor keuangan serta perhubungan dan komunikasi

terutama didukung oleh letak Kota Padang Panjang yang berada di persimpangan jalan menuju kota-kota utama di Sumatera Barat seperti Padang, Bukittinggi dan Solok.



Gambar 4. Struktur Perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2006

Posisi kota yang demikian sebenarnya juga sangat strategis untuk pengembangan kegiatan Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor jasa. Akan tetapi laju pertumbuhan kedua sektor ini ternyata masih relatif rendah yaitu masing-masingnya adalah 3,6% dan 5,0%. Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan ternyata juga relatif rendah yaitu rata-rata 4,1 % setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian ternyata masih cukup tinggi yaitu rata-rata 4,6% setiap tahunnya. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian sebagai akibat mundurnya kegiatan produksi industri kapur.

Tabel 2.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Menurut Sektor Tahun 2005-2006

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (persentase)			
	Tahun 2005		Tahun 2006	
	Pd Panjang	Sumbar	Pd Panjang	Sumbar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	6,58	5,13	4,99	5,01
2. Pertambangan / Penggalian	-51,34	3,09	2,13	3,04
3. Industri Pengolahan	6,31	4,93	4,84	4,47
4. Listrik, Gas & Air Bersih	13,75	12,51	12,01	8,93
5. Bangunan	8,87	4,69	9,05	7,26
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	4,17	5,97	6,16	6,73
7. Angkutan dan Komunikasi	7,53	9,81	7,14	10,27
8. Keuangan, Persew. & Jasa Perusahaan	8,76	6,33	8,25	7,87
9. Jasa – jasa	3,83	4,21	4,12	4,85
<b>PDRB</b>	<b>5,74</b>	<b>5,73</b>	<b>6,11</b>	<b>6,14</b>

Pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup baik tersebut, selanjutnya telah mendorong terjadinya peningkatan pendapatan perkapita dengan harga berlaku dari Rp. 6,2 juta pada tahun 2001 menjadi Rp. 10,0 Juta pada tahun 2005. Nilai pendapatan perkapita ini ternyata telah berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yaitu Rp. 9,5 juta, walaupun nilai ini masih lebih rendah dari Kota Padang. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemakmuran kasar di Kota Padang Panjang sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, daya beli masyarakat juga menjadi relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Kondisi ini tercermin dari relatif rendahnya angka kemiskinan yang terdapat di Kota Padang Panjang, Pada tahun 2007, tercatat sebesar 5,19% Rumah tangga miskin, atau sebanyak 2700 jiwa penduduk miskin. Kenyataan ini menjadikan kota ini termasuk

sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah di Sumatra Barat. Secara implisit kondisi internal kota, yang dilihat dari sisi persoalan kemiskinan, relatif lebih ringan dan ini merupakan salah satu kekuatan yang cukup besar untuk menyelesaikan proses pembangunan pada sektor lainnya. Pelonjakan kemiskinan akhir-akhir ini jelas disebabkan karena semakin meluasnya ukuran kemiskinan. Namun yang jelas karakteristik kemiskinan adalah sebanyak 37,7% mereka yang miskin tidak tamat Sekolah dasar, dan sebesar 70,3% dari pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal.

Tabel 3.  
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2006

Uraian	Tahun	Nilai (Rupiah)	Persentase Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita	2004	9.060.007,83	9,73
	2005*)	9.664.058,82	6,67
	2006**)	10.922.847,11	13,03
Pendapatan Regional Perkapita	2004	8.353.317,60	9,99
	2005*)	8.973.352,94	7,42
	2006**)	10.163.359,86	13,26

Sekalipun demikian persoalan yang masih cukup serius pada kota ini adalah semakin beratnya tekanan ketenagakerjaan, dimana angka pengangguran sudah mencapai 8,08% pada tahun 2007, dan pengangguran yang terberat adalah pada kelompok pencari kerja berusia muda (15-24 tahun), dan berpendidikan menengah sampai tinggi. Kondisi ini kelihatannya akan menjadikan dimensi pasar kerja menjadi salah satu hal yang serius dan perlu ditanggulangi segera oleh pemerintah kota Padang Panjang. Secara implisit perubahan begitu pesat pada peningkatan jumlah sumberdaya manusia, namun perubahan yang relatif menjadi tantangan adalah mutu dari sumberdaya manusia.

Satu-satunya sumberdaya mineral yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah batu kapur yang cukup besar depositnya dan sudah lama digarap oleh masyarakat setempat yang berada di kawasan Bukit Tui yakni pada lokasi disekitar Lakuang Koto Panjang, Lakuang Mudiak Tanah Hitam Atas, Rao-Rao Koto Panjang dan Sungai Andok Tanah Hitam. Sesuai rencana peruntukkan lahan yang dapat dilakukan penambangan batu kapur adalah di daerah Rao-Rao Kelurahan Koto Panjang. Namun demikian, produk yang dapat dihasilkan masih rendah kualitasnya karena tingkat kehalusan yang belum memenuhi syarat yang diminta oleh pasar. Akibatnya potensi permintaan terhadap hasil produksi industri kapur ini tidaklah terlalu besar sehingga pengembangannya relatif lambat.

Selanjutnya dari data pengujian sampel batu kapur mentah pada empat lokasi yang dipilih pada penelitian tersebut diperoleh komposisi batu kapur mentah tersebut sebagai berikut: CaO 50%, CaCO<sub>3</sub> 90 %, MgO 2 – 3%, SiO<sub>2</sub> 0 – 1 % dan FeO<sub>2</sub> 0,1 – 0,25%. Kondisi ini tidak sesuai dengan permintaan pasar dewasa ini terhadap kualitas batu kapur yang dibutuhkan konsumen. Permintaan yang ada saat ini adalah kapur yang mempunyai komposisi MgO dibawah 1 %, dan CaO diatas 90%.

Hal ini berpengaruh terhadap kondisi industri kapur di Kota Padang Panjang, yakni menurunnya permintaan terhadap batu kapur produksi Kota Padang Panjang. Sehingga tungku pembakaran kapur yang semula memproduksi jumlahnya 33 menjadi 13 unit tungku yang masih aktif. Sedangkan tungku pembakaran kapur yang masih terus memproduksi setiap harinya hanya lebih kurang 8 unit tungku.

Berdasarkan rencana peruntukkan lahan, kawasan Bukit Tui merupakan kawasan konservasi, yakni kawasan yang dilindungi dengan pertimbangan bahwa kawasan Bukit Tui mempunyai struktur tanah yang terdiri dari batu kapur/ gamping, berongga dan tidak padat, sehingga rentan terjadinya longsor. Jika kawasan Bukit Tui terus digali/dimanfaatkan untuk penambangan batu kapur, kemungkinan timbulnya longsor



sebagaimana terjadi pada tahun 1987 yang menelan korban yang cukup banyak, bisa saja terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melaksanakan reklamasi lahan dan menjadikan kawasan Bukit Tui sebagai objek wisata alternatif.

#### **a. Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting karena melalui perdagangan akan terjadi proses transaksi yang akan mengantarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen ke konsumen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan peranan yang cukup berarti bagi PDRB Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2006, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 11,69 persen dari total PDRB. Sektor ini merupakan sektor penyumbang ketiga terbesar bagi perekonomian Kota Padang Panjang untuk tahun 2006. Nilai produksi pada tahun tersebut lebih dari tiga puluh delapan milyar rupiah, yang berarti telah terjadi pertumbuhan sebesar 6,16% dari tahun sebelumnya, atau dengan kata lain lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang.

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sub-sektor utama yang memberikan kontribusi sekitar 87 persen dari aktivitas usaha pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kemudian diikuti oleh sub-sektor restoran dan yang terakhir adalah sub-sektor hotel yang sumbangnya relatif kecil, hanya 95,41 juta pada tahun 2006.

#### **b. Jasa-Jasa**

Sektor Jasa-jasa merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 25,55 persen dari Total PDRB Kota

Padang Panjang (atas harga konstan tahun 2000). Laju pertumbuhan produksi sektor ini pada tahun 2006 adalah 4,12 persen . Hal yang menggembirakan adalah pertumbuhan yang lebih besar pada Sub sektor Jasa Swasta sebesar 6,62 persen termasuk kelompok sektor yang pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang sebesar 6,11 persen,

### **c. Pariwisata**

Potensi ekonomi lainnya yang dapat mendorong perekonomian masyarakat adalah bidang pariwisata. Potensi kepariwisataan kota Padang Panjang cukup banyak dan lengkap, baik dari segi aspek budaya, sejarah, alam, pendidikan, kesehatan maupun makanan.

Jumlah kunjungan wisatawan selalu menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun kedepan tentunya diharapkan jumlah kunjungan wisatawan akan semakin meningkat, meskipun saat ini dalam pengembangan pariwisata masih banyak ditemui kendala dan permasalahan, seperti permasalahan produk wisata dimana potensi daya tarik wisata yang ada belum mampu menjadikan Kota Padang panjang sebagai destinasi wisata alternatif atau pendukung, permasalahan lainnya adalah ketersediaan sarana wisata masih terbatas, serta masih terbatasnya sediaan SDM profesional bidang pariwisata, kemudian juga berkaitan dengan permasalahan pemasaran pariwisata. Permasalahan-permasalahan dibidang pariwisata ini tentunya mejadi tantangan bagi Kota Padang Panjang kedepan dalam upaya pengembangan pariwisata, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Padang Panjang. Ada beberapa faktor yang diperkirakanakan mempengaruhi pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dimasa datang antara lain:

1. Pengembangan produk wisata di tiap zona pengembangan pariwisata yang dilakukan secara bertahap dan sistimatis sehingga dapat membentuk pola-pola perjalanan wisata di tiap zona atau antar zona.

2. Peningkatan awareness masyarakat Propinsi Sumatera Barat terhadap kepariwisataan Kota Padang Panjang seiring dengan perkembangan kualitas produk wisata yang dimilikinya.
3. Peningkatan aksesibilitas, baik yang menghubungkan antara Kota Padang Panjang dengan wilayah lainnya maupun di dalam wilayah Kota Padang Panjang, termasuk didalamnya sistim transportasi.
4. Dukungan Sistim Informasi Kepariwisata, untuk kpentingan wisatawan, nvestasi dan perencanaan terkait yang terpadu.

#### **d. Usaha Mikro Kecil Menengah**

Peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian Kota Padang Panjang dan merupakan bagian terbesar dari pelaku Usaha di Padang Panjang. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga telah terbukti tahan terhadap hantaman krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998.

Di Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2007 terdapat 1801 unit usaha yang terdiri dari :

- Usaha Mikro : 1479 unit
- Usaha Kecil : 252 unit
- Usaha Menengah : 70 unit

Sebagian besar kegiatan UMKM ini bergerak di sektor perdagangan eceran (formal dan informal), home industry, pertanian dan jasa perorangan.

#### **e. Industri**

Dari tahun 2003 sampai tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah unit usaha sebesar 11,5 %. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri kota Padang Panjang sampai tahun 2007 juga meningkat sebesar 12,2 %. Nilai bahan baku, nilai produksi dan nilai invenstasi dari tahun 2003 sampai tahun 2007 juga meningkat sebesar 105,8 %, 147,8 % dan

147,8 %. Peningkatan yang cukup besar ini selain disebabkan karena pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir yang cukup baik namun juga disumbang oleh faktor inflasi dan kenaikan harga-harga.

Selain itu pada kurun waktu 2003 – 2008 telah dilakukan pembinaan terhadap industri-industri yang menghasilkan produk-produk unggulan Kota Padang Panjang seperti makanan ringan, bordir dan sulaman, kulit dan produk kulit serta kapur.

Khusus mengenai pengembangan industri kulit pada Tahun 2007, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Koperindag mengajukan proposal kerjasama kepada Departemen Perindustrian untuk merevitaliasasi dan mengembangkan industri kulit di Kota Padang Panjang dan telah disetujui oleh Departemen Perindustrian karena sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk mengembangkan industri kulit di luar Pulau Jawa. Sebagai tindak lanjutnya, Departemen Perindustrian telah menyusun Masterplan Pengembangan Industri Kulit Padang Panjang yang dapat menjadi acuan dan digunakan secara bersama.

Pada Tahun 2008, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Departemen Perindustrian, Gubernur Sumbar dan Walikota Padang Panjang. Dalam MoU tersebut dijelaskan pembagian tugas dan kewajiban masing-masing pihak untuk bekerja secara sinergis melaksanakan Program Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang.

Ke depan, Pola Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang akan dititikberatkan kepada pemberdayaan pengrajin/IKM/masyarakat di bidang usaha kulit dan produk kulit dimana UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang akan menjadi titik sentral pada konsep pengembangan model ini. Sistem pengembangan menggunakan pola UPTD ini telah diterapkan di banyak daerah dan telah sejalan dengan rekomendasi yang tercantum pada Hasil Kajian Kelayakan Usaha PD.Tuah Saiyo. UPTD Pengolahan Kulit ini akan terdiri dari unit penyamakan kulit yang

berlokasi di Komplek RPH Silaing Bawah, unit sentra barang jadi kulit dan unit pengembangan desain barang jadi kulit yang berlokasi di Bukit Surungan. Sentra barang jadi kulit di Bukit Surungan selain akan menjadi tempat produksi sekaligus sebagai tempat penjualan produk-produk kulit dan kerajinan lainnya.

#### **f. Koperasi**

Kondisi Koperasi Kota Padang Panjang dari Tahun 2003 sampai tahun 2007 terlihat bahwa jumlah koperasi yang ada di Padang Panjang sampai tahun 2007 berjumlah 64 buah naik sebesar 4,7 % dari tahun 2003. Sedangkan jumlah anggota koperasi dari tahun 2003 sampai tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 3,4 %. Jumlah modal sendiri koperasi pun dari tahun 2003 sampai tahun 2007 juga mengalami peningkatan sebesar 14,01 %. Volume usaha koperasi sampai tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 12,72 % sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sampai tahun 2007 juga mengalami peningkatan sebesar 27,06 %.

Dari 64 buah koperasi yang ada di Padang Panjang, sebanyak 10 (sepuluh) diantaranya tidak aktif. Untuk koperasi yang tidak aktif akan dilakukan proses pembubaran. Untuk penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi di Kota Padang Panjang yang melakukan RAT tepat waktu pada tahun 2003 hanya 68,5 % namun sampai tahun 2007 Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu adalah sebesar 74,1 % dari koperasi yang aktif.

#### **g. Pertanian**

Jika kita lihat pada sektor pertanian, selama tahun 2007 menghasilkan nilai tambah yang cukup besar dalam struktur perekonomian Padang Panjang. Hal ini terlihat dari kontribusi nilai tambah dalam struktur PDRB Kota Padang Panjang. Sedangkan dilihat dari perannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sektor Pertanian selama tahun 2007

hanya mampu tumbuh sebesar 0,68 persen. Pertumbuhan yang dicapai oleh sektor Pertanian tersebut mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan yang dialami pada tahun 2006 dimana tahun 2006 sektor Pertanian mampu tumbuh sebesar 4,99 persen. Akselerasi pertumbuhan sektor Pertanian selama tahun 2007 tidak terlepas dari adanya peningkatan produksi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan produksi Peternakan. Sub sektor Tanaman Pangan selama tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen, sub sektor Perkebunan mengalami pertumbuhan 7,89 persen, dan untuk sub sektor Perikanan tumbuh sebesar 5,66 persen

Namun sub sektor Peternakan tumbuh ke angka negatif sebesar 3,54 persen, berbanding terbalik dengan tahun 2006 yang tercatat mencapai pertumbuhan yang paling tinggi di sektor Pertanian, yakni sebesar 5,47 persen. Tingginya pertumbuhan sub sektor ini terutama ditunjang oleh tingginya produksi daging segar yang sudah menjadi "Trade mark" Kota Padang Panjang.

Sementara itu sub sektor Kehutanan yang potensinya semakin lama semakin menurun, mengakibatkan pertumbuhan sub sektor Kehutanan selama tahun 2007 mengalami penurunan kinerja yang ditunjukkan dengan pertumbuhan paling rendah yakni sebesar 0,75 persen. Dengan maraknya pemberantasan illegal logging nampaknya cukup berakibat semakin berkurangnya produksi dari hasil hutan yang potensinya juga sudah semakin berkurang. Sehingga produksi yang dihasilkan selama tahun 2007 secara perlahan terus mengalami penurunan.

### **2.1.7. Pemerintahan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini tentunya juga berlaku bagi pemerintahan daerah Kota Padang Panjang, dimana sesuai dengan ketentuan, masa kepemimpinan Pemerintah Kota Padang Panjang saat ini akan berakhir tahun 2008.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Hal ini dikukuhkan dengan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September 1957 No. 12/K/DPRD-PP/57. Kemudian secara administrasi pemerintahan, Kota Padang Panjang dibagi atas 2 kecamatan (Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat) dengan 16 kelurahan, dimana masing-masing kecamatan terdiri dari delapan kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1982.

Secara umum tantangan ke depan dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang antara lain adalah bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi, efisiensi dan efektifitas kelembagaan, penegakan hukum dan HAM, peningkatan pelayanan, rekrut aparatur yang profesional, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara pada perwujudan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

#### **a. Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dengan demikian, pola hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Tantangan utama ke depan dalam mewujudkan pola hubungan kemitraan ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman nilai-nilai kemitraan dan kesejajaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



Selama ini pola hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padang Panjang telah terjalin dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ini merupakan potensi yang harus ditumbuhkembangkan dimasa datang dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat.

## **b. Organisasi Perangkat Daerah**

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya bidang kewenangan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan bidang kewenangan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang Panjang saat ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Adapun gambaran kelembagaan Pemerintah Kota Padang Panjang seperti terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 4  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2004

No	SOTK	jumlah	Ket
1	Sekretariat Daerah	1	Ditetapkan dengan Perda Nomor 20 s/d 42 Tahun 2004
2	Sekretariat DPRD	1	
3	Dinas Daerah	9	
4	Badan	2	
5	Inspektorat	1	
6	Kantor	5	
7	Satpol PP	1	
8	RSUD	1	
9	Kecamatan	2	
10	Kelurahan	16	

Dalam pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Padang Panjang, dihadapkan pada sejumlah kendala antara lain seringnya terjadi perubahan aturan dasar yang terkadang berbenturan dengan kebutuhan dan potensi daerah, organisasi perangkat daerah yang belum efisien dan efektif, tatalaksana dan hubungan tatakerja yang masih perlu dioptimalkan guna mewujudkan profesionalisme pelayanan.

Untuk itu, pembentukan dan pengembangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang diarahkan pada upaya penciptaan struktur yang kaya fungsi, sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Ini dimaksudkan agar semua organisasi perangkat daerah betul-betul bekerja profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini semua tentunya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

### **c. Aparatur**

Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen aparatur dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,

penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Jumlah aparatur pemerintahan Kota Padang Panjang saat ini (tahun 2005) sebanyak 1942 orang, terdiri dari golongan I 35 orang, golongan II 389 orang, golongan III 1185 orang dan golongan IV 333 orang.

Beberapa tantangan ke depan dalam pengelolaan atau manajemen aparatur antara lain pola rekrutmen aparatur, pola pengembangan karier aparatur yang belum profesional, Kapasitas dan produktifitas aparatur yang belum proporsional, pengembangan aspek akuntabilitas, moral, disiplin dan kesejahteraan aparatur yang perlu menjadi perhatian yang lebih serius, sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang ada.

#### **d. Sarana dan Prasarana**

Dukungan dan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari totalitas penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai dan proporsional dalam pelaksanaan tugas.

#### **e. Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Terwujudnya suatu ketentraman dan ketertiban yang kondusif merupakan prasarat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas. Sekaitan dengan ini maka keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa jauh tingkat disiplin sosial masyarakat yang diwujudkan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat harus ditujukan untuk menciptakan iklim dan kondisi masyarakat yang aman, teratur, tentram dan tertib sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Tantangan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum antara lain terbatasnya personil, baik kuantitas maupun kualitasnya, keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan dan aparat trantib, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran warga tentang hukum dan peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut dengan sanksi hukum.

Di samping itu, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat juga ditujukan pada penataan, pengaturan serta mewujudkan fungsi komponen pendukung perlindungan masyarakat serta tenaga - tenaga sukarela masyarakat yang terorganisasi dalam sistem keamanan lingkungan. Pembangunan kemampuan masyarakat diarahkan untuk menggerakkan peran aktif masyarakat dalam menanggulangi dan memperkecil kemungkinan gangguan trantib dilingkungannya.

## **2.2 Perubahan Lingkungan Strategis**

Perubahan lingkungan strategis adalah faktor dan kondisi penting dan mempengaruhi kegiatan pembangunan dimasa mendatang yang dimiliki secara alamiah dan menonjol bilamana dibandingkan dengan daerah lain. Dengan memanfaatkan secara optimal lingkungan strategis tersebut akan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kota secara keseluruhan. Lingkungan strategis tersebut dapat berasal dari dalam Kota Padang Panjang sendiri (internal) maupun dari luar daerah (eksternal).

### **2.2.1 Lingkungan Internal Daerah**

Beberapa perubahan lingkungan internal Kota Padang Panjang yang cukup menonjol dan sangat mempengaruhi kondisi umum daerah dan gerak pembangunan kota dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

### a. Letak Kota Semakin Strategis

Kekuatan lingkungan kota adalah sebagai sebuah kota yang terletak pada lintas Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Solok-Bukittinggi, menjadikan kota Padang Panjang memperoleh keuntungan dan kerugian. Dua keuntungan yang dapat dijadikan sebagai konsekuensi keadaan yang dinamis. *Pertama*, kota yang dilalui oleh lalu lintas barang dan orang merupakan peluang permintaan terhadap pelayanan barang-barang dan jasa-jasa. Dengan semakin berkembangnya Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Batusangkar, maka posisi Kota Padang Panjang yang terletak dipersimpangan jalan menuju kota-kota tersebut otomatis akan menjadi semakin strategis bagi kegiatan perhubungan dan komunikasi, perdagangan dan jasa. *Kedua*, Padang Panjang juga dikelilingi oleh kawasan yang sangat subur, dan dapat menghasilkan berbagai komoditas pertanian, dan peternakan. Dengan berkembangnya kegiatan pertanian di Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Padang Pariaman, maka posisi Kota Padang Panjang sebagai pusat perdagangan hasil pertanian akan menjadi semakin penting.

Proses pembangunan fasilitas publik juga semakin intensif dan berkembang. Hingga saat ini, telah dapat dilengkapi berbagai fasilitas pasar, untuk kawasan yang berdekatan dengan terminal angkutan kota antar daerah. Dengan tersedianya pasar grosir hasil pertanian, dan telah beroperasi secara penuh, menjadikan Kota Padang Panjang sebagai salah satu kawasan pergrosiran baru untuk produk pertanian yang cukup penting di Sumatera Barat. Pada pasar grosir hasil pertanian, telah pula berdatangan dibawa oleh para pedagang yang berasal dari daerah sekeliling, dan bahkan juga berasal dari provinsi luar Sumatra Barat.

Selain dari pasar produk pertanian, yang perlu disikapi berkaitan dengan fasilitas perdagangan adalah pasar pusat Padang Panjang, yang berada di pusat kota, yang merupakan pusat perdagangan, dimana kondisinya pada saat ini sudah tidak representatif, baik dari segi fasilitas, daya tampung

pedagang, sarana pendukung lainnya seperti parkir, jika dilihat dari kondisi bangunan, pasar pusat yang ada sekarang tidak layak lagi untuk dijadikan pusat perdagangan yang nyaman. Kondisi pasar pusat ini perlu diremajakan, karena pertumbuhan pedagang semakin meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu dalam jangka pendek, segera akan dibangun pula tambahan fasilitas pasar pusat, yang dilengkapi dengan pembangunan berbagai sarana perdagangan.

Pembangunan dan pengembangan pasar pusat ini sangat strategis mengingat posisi kota Padang Panjang yang strategis berada di perlintasan.

Kedinamisan kedua aspek ini dapat menghasilkan berbagai peluang dan kesempatan ketika peluang tersebut diterjemahkan ke dalam program pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah bersama masyarakat yang hidup di kota Padang Panjang. Peluang-peluang yang masih begitu besar untuk dikelola oleh masyarakat Padang Panjang adalah menjadikan kota Padang Panjang sebagai tempat industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Selain dari itu kota Padang Panjang dapat pula dijadikan sebagai salah satu pusat pelayanan perdagangan untuk jenis produk primer maupun produk olahan.

Ancaman utama bagi Kota Padang Panjang dewasa ini dengan akan dibangunnya fasilitas Jalan Poros Malalak Sicincin sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Agam dan kota Bukittinggi. Untuk menghadapi hal itu, Jalur Padang Panjang-Bukittinggi perlu diperluas, serta meningkatkan dan melengkapi daya tarik kota Padang Panjang.

## **b. Rasa Ke-Islaman yang Semakin Tinggi**

Kekuatan yang dimiliki daerah adalah kekuatan dinamis, faktor statis-historis yang melekat ke dalam tatanan kota Padang Panjang adalah tumbuh dan berakarnya nilai-nilai agama dan budaya yang ada, yang membuat Padang Panjang memiliki keunikan tersendiri. Kenyataan ini dijadikan oleh masyarakatnya sebagai kota Serambi Mekah, kota dimana diharapkan implementasi kehidupan sosial ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip Islami.

Rasa keIslaman yang tinggi ini telah mendorong Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan agama Islam untuk Provinsi Sumatera Barat. Peserta didik tidak hanya berasal warga Kota Padang Panjang sendiri, tetapi juga banyak yang berasal dari luar daerah. Pendidikan keagamaan ini terfokus kepada pendidikan ke-Islaman, pendidikan umum dan kejuruan. Perkembangan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang yang ditempuh sebelumnya. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang, dan menjadikan kota ini sebagai kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera Tengah dan Utara. Bahkan perubahan kondisi internal ini dapat pula dijadikan sebagai faktor pengembangan kegiatan pariwisata spesifik yang berorientasi pada aspek agama dan budaya.

Kelemahan yang dirasakan adalah masih belum lengkapnya dukungan para *stakeholders* dan pemahaman akan prinsip Islami dalam tata kehidupan ekonomi dan sosial. Akibatnya, rasa keIslaman masih perlu ditopang dengan intensitas melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan beragama, sosial, maupun ekonomi.

### **c. Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi mulai sejak tanggal 1 januari 2001 yang lalu, merupakan probahan lingkungan strategis internal yang cukup penting untuk masa depan Kota Padang Panjang. Bahkan dengan adanya upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah nasional untuk memperbaiki peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ke depan pelaksanaan otonomi daerah ini diperkirakan akan bertambah baik dan kelemahan serta dampak negatif yang terjadi selama ini secara bertahap akan dapat dikurangi.

Dengan semakin baiknya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka peranan pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan semakin besar dalam penentuan arah dan pengelolaan pembangunan daerah. Pemikiran, inisiatif dan kontrol dari masyarakat setempat akan dapat diserap secara lebih optimal sehingga kegiatan pembangunan akan dapat diarahkan sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan cara demikian, penolakan dan reaksi negatif dari masyarakat akan dapat diminimalkan dan kondisi ini sekaligus akan membangkitkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang. Namun demikian, kelemahan yang dirasakan adalah masih belum sempurnanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan adanya pemahaman yang kurang tepat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut.

#### **2.2.2 Lingkungan Eksternal**

Beberapa perobahan lingkungan eksternal yang bersifat strategis terjadi diluar Kota Padang Panjang, tapi sangat berpengaruh pada kondisi umum dan gerak langkah pembangunan kota di masa mendatang antara lain adalah sebagai berikut;



### **a. Bandara Internasional Minangkabau**

Bulan Juli tahun 2005 yang lalu *Bandar Udara Internasional Minangkabau* (BIM) telah resmi beroperasi dan dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar. Bahkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan mulai tahun 2006 pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci Makkah dapat dilakukan langsung dari bandara ini. Perkembangan yang demikian, tentunya akan mendorong peningkatan kegiatan angkutan udara dari dan ke Kota Padang, tidak hanya untuk penerbangan domestik, tetapi juga untuk penerbangan manca negara.

Adanya fasilitas angkutan udara yang cukup baik tersebut tentunya akan membawa pengaruh positif yang besar terhadap pengembangan kegiatan perhubungan, perdagangan, jasa dan pariwisata di Kota Padang Panjang. Kapasitas BIM yang cukup besar akan mendorong terbukanya jalur penerbangan antara Padang dengan wilayah Semenanjung Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan China Selatan. Demikian juga kegiatan penerbangan domestik akan semakin ramai, termasuk hubungan antara Padang, Jakarta, Yogyakarta, dengan pulau Bali sebagai kota wisata. Kesempatan ini perlu dijadikan faktor strategis yang dapat dioptimalkan oleh kota Padang Panjang untuk meningkatkan kegiatan perhubungan yang selanjutnya dapat mendorong proses pengembangan kegiatan ekonomi dan pembangunan kota secara keseluruhan.

### **b. Pelebaran Jalan Padang-Pekanbaru**

Mulai tahun 2005 yang lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mulai melakukan pelebaran jalan raya Padang-Pekanbaru melewati Kota Padang Panjang. Sejalan dengan kegiatan ini dilakukan pula pembangunan jembatan layang (*fly-over*) kelok sembilan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu tempuh dari provinsi Riau dan daerah lain di Sumatera Bagian Timur yang juga melewati Kota Padang Panjang. Pelebaran jalan ini sangat besar artinya bagi kota Padang

Panjang karena akan dapat mendorong intensitas mobilitas perhubungan darat, perdagangan dan jasa serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari provinsi Riau.

Kegiatan ini jelas merupakan perubahan lingkungan strategis eksternal yang cukup penting artinya bagi pengembangan Kota Padang Panjang sebagai kota yang berada dipersimpangan jalan menuju kota-kota utama di Sumatera Barat. Ini berarti bahwa perkembangan fasilitas perhubungan yang ada akan dapat dijadikan jendela untuk pengembangan kegiatan perhubungan, perdagangan dan jasa di Kota Padang Panjang serta masuknya berbagai wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Perubahan lingkungan strategis ini perlu ditindaklanjuti dengan apa yang perlu dikerjakan oleh Kota Padang Panjang. Keinginan untuk berkembang sebagai kota perhubungan dan jasa adalah sesuatu yang sangat logis diwujudkan di Kota Padang Panjang dimasa mendatang.

### **c. pembangunan jalan Sicincin – Malalak**

Jika jalan ini selesai dibangun maka untuk transportasi Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang selama ini meramaikan lalu lintas Padang Panjang akan beralih menggunakan jalur Sicincin-Malalak yang lebih singkat dan lebih lurus. Akibatnya Padang panjang tidak lagi strategis sebagai Kota Perlintasan. Perkembangan ini akan berdampak terhadap perekonomian di wilayah yang selama ini merupakan jalur perlintasan, khususnya sektor jasa, rumah makan, pariwisata, dan angkutan.

### **d. Globalisasi Perekonomian Dunia**

Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (*free trade*) secara menyeluruh, baik negara maju dan berkembang, akan dilakukan pada tahun 2020 nanti. Sedangkan khusus untuk kawasan ASEAN telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 yang lalu dengan dilaksanakannya secara

resmi AFTA (*Asean Free Trade Area*). Ini berarti bahwa proses globalisasi perekonomian dunia secara menyeluruh akan terjadi pada tahun 2020 mendatang. Pada waktu itu mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas karena *hambatan bea masuk (Tariff Barrier)* dan hambatan lainnya (*Non Tariff Barrier*) sudah akan tidak ada sama sekali. Akibatnya persaingan dalam bidang perdagangan dan investasi diperkirakan akan meningkat tajam. Demikian pula halnya dengan persaingan di pasar kerja juga akan meningkat tajam karena tenaga kerja asing sudah akan bebas masuk memperebutkan lapangan kerja yang tersedia dalam negeri.

Perubahan lingkungan eksternal yang demikian diperkirakan akan memberikan dampak negatif dan sekaligus positif terhadap perekonomian Kota Padang Panjang. Pada satu segi globalisasi ini akan merupakan tantangan yang cukup berat karena kompetisi yang semakin tajam. Tetapi dipihak lain globalisasi ini juga sekaligus merupakan suatu peluang bagi Kota Padang Panjang untuk memanfaatkan situasi tersebut guna mendorong peningkatan kegiatan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan keagamaan dan jasa. Karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing Kota Padang Panjang, baik dalam bidang ekonomi maupun sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam jangka panjang.

#### **e. Perkembangan Pembangunan Daerah tetangga**

Melihat perkembangan daerah tetangga yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Paraman, Kota Bukittinggi, maka hal ini sangat mempengaruhi perkembangan Kota Padang Panjang ke depannya, dan ini merupakan tantangan bagi Kota Padang Panjang yang perlu disikapi. Seperti antara lain rencana pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang yang nantinya berada pada satu lintasan antara Kota Padang dan Padang Panjang, sehingga daerah pusat ibukota Padang pariaman tentunya juga akan semakin berkembang, baik di bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Demikian juga dengan perkembangan Kota Bukittinggi yang demikian pesatnya, tentunya juga mempengaruhi perkembangan Kota Padang panjang. Begitu juga dengan Kabupaten Tanah Datar yang merencanakan kawasan agropolitan, namun semua peluang dan akses pembangunan daerah tetangga ini harus kita manfaatkan dengan optimal.

### **2.2.3 Lingkungan Fisik**

Letak geografis kota Padang Panjang di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya merupakan faktor strategis bagi kota ini. Secara historis pemerintah Belanda menjadikan Padang Panjang sebagai simpul regional Kereta Api Sumatera Tengah karena letaknya yang strategis tersebut. Kondisi ini ini menjadi modal dasar bagi kota Padang Panjang untuk mudah diakses oleh transportasi darat. Jalan raya Padang-Bukittinggi merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi kota Padang Panjang.

Sebagai penyangga kota Bukittinggi, kota Padang Panjang juga mendapatkan manfaat dari perkembangan kota Bukittinggi yang saat ini terus menggalakkan aktifitas untuk mewujudkan diri sebagai kota wisata, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas fisik yang relatif terbatas di kota Bukittinggi memungkinkan kota Padang Panjang menangkap peluang dalam bidang wisata, kesehatan, restoran, dan perdagangan.

Namun demikian, pembukaan jalan alternatif dari Padang Pariaman – Malalak–Bukittinggi bisa merupakan ancaman bagi kota Padang Panjang. Jalan alternatif ini sendiri bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi antara Kota Padang dan Bukittinggi. Pembangunan ruas jalan ini menjadi ancaman bagi Kota Padang Panjang jika tidak ada aktifitas yang menarik orang untuk berkunjung ke Kota

Padang Panjang. Justru itu pembangunan ruas jalan ini harus disikapi dengan menciptakan daya tarik orang untuk tetap melewati/singgah di Kota Padang Panjang terutama yang menggunakan kendaraan pribadi.

Potensi sumber air minum cukup besar di Padang Panjang yang berasal dari air sungai dan air tanah. Topografinya yang berupa perbukitan dan sungai yang berada di lokasi yang lebih tinggi merupakan potensi untuk menyediakan air bersih dan mendistribusikannya dengan biaya yang lebih murah, sebagaimana halnya yang terjadi di kota Bogor. Pengaliran air minum dari sumbernya menjadi lebih mudah dengan debit yang cukup tinggi. Alamnya yang asri dan alami menyebabkan biaya pengolahan air minum menjadi rendah. Sejauh ini sungai atai sumber mata air ini baru dimanfaatkan dalam jumlah yang relatif kecil, di samping juga telah dijadikan objek wisata seperti Sungai Lubuk Mata Kucing.

Kondisi alam yang asri merupakan potensi yang besar untuk pengembangan wisata alam, yang sejauh ini belum tergarap secara optimal. Peningkatan dan penambahan jalan ke lokasi wisata akan mampu menyedot wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Lahan yang subur juga merupakan potensi bagi kota Padang Panjang dalam menghasilkan sayuran dan hortikultura lainnya. Namun kecendrungan peningkatan permintaan terhadap permukiman dan aktifitas lainnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini akan lebih menegaskan fungsi kota sebagai kawasan perdagangan dibandingkan dengan kawasan budidaya pertanian. Namun bagi kota Padang Panjang kondisi ini sudah tepat, karena lahan kota yang terbatas. Nilai tambah subsistem agribisnis perdagangan hortikultura (*off farm*) lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah subsistem budidaya agribisnis hortikultura (*on farm*). Di samping itu budidaya pertanian membutuhkan lahan yang lebih luas.

00000

# Bab III

## PREDIKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

Untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 2005-2025 mendatang dengan lebih tepat dan terarah, diperlukan proyeksi jangka panjang tentang pembangunan kota untuk periode 20 tahun mendatang yang meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia serta tata-ruang dan pembangunan wilayah. Proyeksi ini sangat penting dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pembangunan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2025 mendatang. Dengan adanya gambaran masa depan ini diharapkan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan kota Padang Panjang untuk jangka panjang akan menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, agar hasil proyeksi dapat bermanfaat pula bagi penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* Daerah (RPJMD), proyeksi jangka panjang untuk periode 2005-2025 ini dipecah ke dalam tahapan 5 tahunan.

### 3.1 Prediksi Pembangunan Ekonomi

Unsur utama dalam pembangunan ekonomi kota yang perlu diproyeksikan adalah menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sampai tahun 2025 mendatang. Sebagaimana biasanya pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dengan menggunakan data menurut urutan waktu (time series) untuk periode 2002-2005.

Sejalan dengan hal ini, melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi kota tersebut akan dapat pula diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang

diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan. Di samping itu dengan diketahuinya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat pula dihitung besarnya tingkat pendapatan perkapita yang dapat dicapai untuk masa 20 tahun mendatang yang merupakan indikator kasar dari kemajuan ekonomi yang diperkirakan akan dapat dicapai masyarakat Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2025 nantinya.

Tabel 5  
Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita

Tahun	PDRB (juta Rp)	pdrb per kapita (jutaRp per jiwa)
2005	Rp549.189,83	Rp10,92
2006	Rp579.171,51	Rp11,18
2007	Rp611.456,80	Rp11,46
2008	Rp646.271,20	Rp11,77
2009	Rp683.865,38	Rp12,11
2010	Rp724.518,11	Rp12,48
2011	Rp768.539,69	Rp12,88
2012	Rp816.275,72	Rp13,31
2013	Rp868.111,30	Rp13,78
2014	Rp924.475,90	Rp14,30
2015	Rp985.848,66	Rp14,86
2016	Rp1.052.764,49	Rp15,47
2017	Rp1.125.820,83	Rp16,13
2018	Rp1.205.685,39	Rp16,85
2019	Rp1.293.104,69	Rp17,63
2020	Rp1.388.913,84	Rp18,48
2021	Rp1.494.047,43	Rp19,41
2022	Rp1.609.551,89	Rp20,42
2023	Rp1.736.599,35	Rp21,52
2024	Rp1.876.503,27	Rp22,73
2025	Rp2.030.736,11	Rp24,04

Non-commercial use only

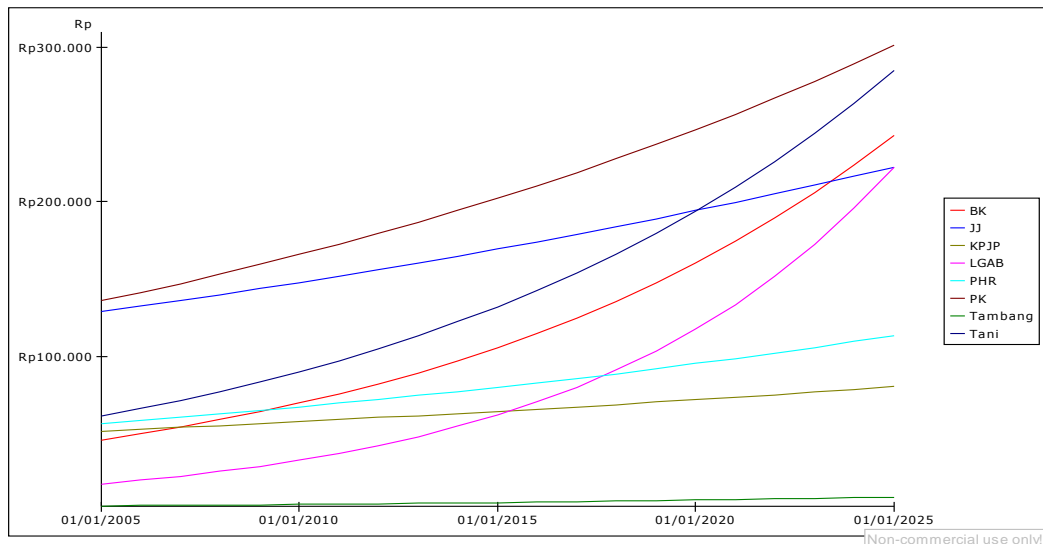
*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* secara total untuk Kota Padang Panjang tahun 2006 ditaksir berdasarkan hasil perhitungan ICOR yang telah dilakukan untuk Provinsi Sumatera Barat, tetapi dengan sedikit modifikasi yaitu mengeluarkan sektor pertanian dari dalamnya. Cara yang demikian dirasakan cukup logis mengingat perekonomian Kota Padang

Panjang makin lama akan makin didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri dan jasa. Dengan cara demikian, perkiraan ICOR untuk Kota Padang Panjang adalah 4,75 yaitu sedikit lebih tinggi dari perkiraan untuk Provinsi Sumatera Barat. Alasannya adalah karena penggunaan modal akan semakin tinggi karena kegiatan ekonomi kota makin lama akan semakin didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri dan jasa. Akibatnya ICOR pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan menjadi lebih tinggi yaitu 5,65.

Dengan diketahuinya proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR, dapat pula diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan yang telah ditargetkan untuk tahun 2006. Untuk keperluan ini terlebih dahulu perlu dihitung perkiraan PDRB dengan harga konstan yang kemudian dikalikan dengan tingkat inflasi untuk mendapatkan PDRB dengan harga berlaku. Dari sini akan dapat pula dihitung tambahan (delta) PDRB harga berlaku untuk setiap tahunnya.

Kemudian dengan mencari peningkatan PDRB harga konstan tersebut dengan ICOR diperoleh perkiraan kebutuhan investasi harga berlaku untuk Kota Padang Panjang tahun 2006 sebesar Rp. 271 Miliar. Dari kebutuhan investasi yang demikian, 40 % (Rp, 108 Miliar) akan dapat disediakan oleh pemerintah sedangkan sisanya sebesar Rp. 163 miliar diharapkan akan dapat dipenuhi melalui investasi swasta dan masyarakat.





Gambar 8. Laju perkembangan sektor-sektor ekonomi

Selanjutnya, perkiraan laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ditetapkan berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan oleh BPS Sumatera Barat. Dengan cara demikian, maka perkiraan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang untuk tahun 2007 adalah sebesar 1,20 %. Dengan demikian, laju pertumbuhan PDRB perkapita harga konstan akan menjadi sebesar 4,60 %. Kemudian dengan menambahkan laju pertumbuhan PDRB harga konstan ini dengan proyeksi laju inflasi sebesar 7,00 %, diperoleh laju pertumbuhan PDRB dengan harga berlaku sebesar 6,11%. Perkiraan ini lebih tinggi dari perkiraan untuk Provinsi Sumatera Barat karena data sejak tahun 2004 memang sudah menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Sumatera Barat.

Untuk tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang diperkirakan sudah lebih baik, yaitu sebesar 6,35% karena pengaruh negatif krisis ekonomi sudah mulai hilang. Sementara itu, teknologi produksi secara bertahap diperkirakan sudah akan berubah menjadi semakin padat modal. Keadaan ini terutama disebabkan oleh perkembangan sektor industri, perdagangan, angkutan dan jasa yang biasanya menggunakan lebih banyak modal dibandingkan dengan sektor pertanian. Sementara itu sektor pertanian Kota Padang Panjang akan

semakin berkurang karena semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk daerah pemukiman dan fasilitas perkotaan lainnya. Keadaan ini menyebabkan ICOR secara rata-rata diperkirakan akan meningkat menjadi 5,00.

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi kota yang sudah lebih baik dan ICOR yang lebih tinggi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut juga akan semakin tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp. 350 Miliar. Dari kebutuhan investasi total ini, Rp. 140 Miliar akan dapat disediakan dari pemerintah daerah dan sisanya Rp. 210 miliar diharapkan akan dapat diperoleh dari sektor swasta dan masyarakat.

Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 ini diperkirakan akan sedikit lebih tinggi, yaitu 1,21%, karena pengaruh urbanisasi yang lebih tinggi dari tingkat penurunan penduduk sebagai hasil pelaksanaan *Program Keluarga Berencana*.

Pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kota Padang Panjang diperkirakan sudah akan semakin baik, yaitu tumbuh rata-rata 6,70 %. Sementara itu teknologi produksi akan semakin berkembang dan penggunaan mesin dan peralatan semakin banyak sehingga teknologi yang dipergunakan semakin Padat Modal. Akibatnya, ICOR secara total meningkat menjadi 5,25. Berdasarkan hal ini, maka kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga meningkat menjadi Rp. 788 Miliar dimana Rp. 315 miliar diantaranya diharapkan dapat disediakan oleh pemerintah.

Untuk tahun 2020 perekonomian Kota Padang Panjang akan semakin stabil dan bertumbuh semakin cepat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi kota akan bersifat padat modal, maka ICOR akan meningkat menjadi 5,41. Dengan demikian perkiraan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan

ekonomi tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 1,4 Triliun. Dari jumlah ini sekitar Rp. 589 Miliar akan diperoleh dari pembiayaan pemerintah dan sisanya Rp. 823 Miliar dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat yaitu 1,23 persen rata-rata setahun sebagai akibat urbanisasi yang semakin tinggi.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang akan mencapai puncaknya dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,40 % setiap tahunnya. Sementara itu ICOR akan mencapai 5,65 sehingga kebutuhan investasi total dengan harga berlaku yang diperlukan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi kota tersebut mencapai Rp. 2,7 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp. 1,1 triliun akan diperoleh dari dana pemerintah dan sisanya sekitar Rp. 1,6 Triliun diharapkan akan diperoleh dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sudah semakin meningkat menjadi 1,35 % rata-rata setiap tahunnya. Perkiraan ini rasanya tidaklah terlalu berlebihan karena RPJPD Nasional memperkirakan bahwa tingkat pendapatan rata-rata Indonesia pada tahun 2025 mendatang adalah US \$ 6.000. Sebagaimana biasanya tingkat pendapatan perkapita kota umumnya sedikit lebih tinggi dari tingkat pendapatan rata-rata Nasional dimana di dalamnya termasuk juga daerah pedesaan.

### **3.2. Prediksi Pembangunan Manusia**

Prediksi pembangunan manusia mempedomani hasil prediksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap indikator-indikator yang menunjukkan tinggi-rendahnya pencapaian dari mutu dan pemerataan kualitas manusia. Diantaranya dinilai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Indeks yang lazim digunakan oleh UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam Indeks Pembangunan Manusia, aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek daya beli adalah dijadikan 3 komposit indeks.

Tabel 5  
Proyeksi perkembangan IPM

IPM					
Tahun	HH (thn)	Lama sekolah (thn)	Melek huruf (%)	Daya beli (Ribu Rp)	IPM
2005	69,01	10,70	97,53	Rp617	77,01
2006	69,11	10,97	97,54	Rp618	77,34
2007	69,22	11,24	97,55	Rp618	77,68
2008	69,32	11,52	97,56	Rp619	78,03
2009	69,42	11,81	97,57	Rp620	78,38
2010	69,53	12,11	97,58	Rp621	78,73
2011	69,63	12,41	97,59	Rp622	79,09
2012	69,73	12,72	97,60	Rp623	79,46
2013	69,84	13,04	97,61	Rp624	79,84
2014	69,94	13,36	97,62	Rp625	80,21
2015	70,05	13,70	97,63	Rp625	80,60
2016	70,15	14,04	97,64	Rp626	80,99
2017	70,25	14,39	97,65	Rp627	81,39
2018	70,36	14,75	97,66	Rp628	81,80
2019	70,46	15,12	97,67	Rp629	82,21
2020	70,57	15,50	97,68	Rp630	82,63
2021	70,67	15,88	97,69	Rp631	83,05
2022	70,78	16,28	97,70	Rp632	83,49
2023	70,88	16,69	97,71	Rp632	83,93
2024	70,99	17,11	97,72	Rp633	84,38
2025	71,10	17,53	97,73	Rp634	84,84

Non-commercial use only

Sesuai dengan kesepakatan bersama (*Millenium Development Goal*), Indeks Pembangunan Manusia, perlu diperbaiki. Mengingat kondisi tahun 2004 IPM kota Padang Panjang telah dicapai setinggi 75,6. Maka Kota Padang Panjang pada tahun 2025 sebenarnya sudah dapat dikategorikan sebuah kota yang masuk kategori kota sejajar dengan negara-negara maju, dimana diperkirakan IPM akan tercapai setinggi 84,84.

Asumsi optimis yang diterapkan dalam memprediksi pembangunan manusia disebabkan karena dari 3 indeks yang digunakan, indeks yang terkait dengan kesehatan yang dinyatakan perlu mendapatkan prioritas, kemudian diikuti oleh indeks yang terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat. Namun perlu pula dicatat bahwa IPM baru sekedar pencapaian target minimum dalam pembangunan manusia. Pada masa

yang akan datang, pembangunan manusia yang komprehensif adalah suatu prediksi yang sangat diharapkan oleh warga kota. Komprehensif dalam hal ini menyangkut unsur pencapaian kualitas pada beberapa bidang tertentu yaitu: sains, matematika, bahasa dan bahasa Arab. Saat bersamaan pencapaian kualitas tidak saja pencapaian IQ, namun Emosional (EQ), spritual (SQ) dan kinetik anak, melalui olah raga dan seni.

### **3.2.1 Tingkat Pendidikan**

Dua komponen pendidikan yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan sektor pendidikan. Pertama adalah pencapaian pemerataan pendidikan dan kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Untuk komponen pertama dapat dipahami dari sisi tingkat partisipasi penduduk usia sekolah mengikuti sistem pendidikan pada level pendidikan dasar dan menengah. Target pendidikan universal secara Nasional diperkirakan akan dicapai pada tahun 2015, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) untuk kelompok usia anak 7-15 tahun dan 16-18 tahun adalah masing-masingnya mendekati 100% dan 80%.

Untuk kondisi kota Padang Panjang, direncanakan pencapaian target pendidikan untuk semua pada jenjang pendidikan dasar adalah pada tahun 2009 dan tahun 2012 untuk jenjang pendidikan menengah. Dengan arti kota Padang Panjang diperkirakan lebih cepat 5 tahun menyelesaikan pemerataan pendidikan dibandingkan dengan target nasional. Hal ini cukup beralasan mengingat pencapaian untuk kelompok pendidikan dasar sudah hampir selesai. Bersamaan dengan itu tahun 2010 Padang Panjang terbebas dari kebodohan, yang dinilai dari tingkat buta huruf untuk penduduk dewasa.

Mutu pendidikan didefinisikan sebagai pemenuhan kompetensi pada pilihan bidang pendidikan dengan fokus kepada *Sains, Matematik,*

*Bahasa Arab dan Bahasa Inggris*. Sehingga diharapkan konsentrasi penajaman pendidikan diarahkan kepada pencapaian kompetensi ke empat jenis itu, selain dari kemas pendidikan baik umum atau kejuruan menghasilkan pencapai unsur unsur emosional dan spritual, selain dari intelektual. Untuk itu segala sumberdaya diarahkan untuk pencapaian kompetensi itu, melalui pengembangan mutu alat pembelajaran, mutu guru, dan penyesuaian kurikulum. Dan diharapkan kota Padang Panjang dapat menjadi 15 terbaik di peringkat nasional.

### **3.2.2 Tingkat Kesehatan Masyarakat**

Prediksi indikator kesehatan didasari oleh target *Millenium Development Goal*. Indikator utama adalah penurunan angka kematian bayi menjadi 15 per 1.000 tahun 2025, angka setara dengan pencapaian pada Negara berpenghasilan tinggi.

Pilihan akan pelayanan kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kesehatan yang sesuai dengan persoalan kesehatan dan posisi strategis daerah kota. Untuk itu Padang Panjang dijadikan sebagai pusat pelayanan rumah sakit terakreditasi secara internasional untuk pelayanan jenis Respirasi (Pernapasan) . Pilihan akan respirasi (pernafasan) adalah dengan mempertimbangkan jenis penyakit yang sangat terkait dengan kondisi lingkungan.

Di sektor pendidikan, diproyeksikan pencapaian mutu dari level keberhasilan peringkat Sumatera Barat, menjadi peringkat nasional. Namun ukuran kualitas tidak saja dari aspek intelijensia, namun lebih luas lagi dengan memasukkan unsur emosional dan spritual. Sementara itu, angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi diperkirakan akan tercapai setinggi 60% tahun 2025 setaraf dengan kondisi yang sudah dicapai oleh negara maju.

Sektor pelayanan kesehatan, selain berupaya mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan dasar, juga mengembangkan dua unsur pelayanan dominan yang dijadikan sebagai *trade mark* ciri pelayanan kesehatan dan direncanakan terakreditasi tahun 2010. Dimana tahun 2010 hasil akreditasi menunjukkan pelayanan kesehatan ini dapat diakui sebagai pelayanan bertaraf internasional. Sehingga tahun 2016 sampai tahun 2025 pelayanan rumah sakit untuk jenis pelayanan stroke dan traumatic diperkirakan sudah akan berjalan pada taraf pelayanan internasional.

### **3.2.3 Penyediaan Lapangan Kerja**

Upaya untuk mengatasi tekanan tenaga kerja adalah melalui upaya memperluas investasi dan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja pada sektor pemerintahan tidak mungkin dikembangkan lagi, mengingat daya dukung keuangan daerah dalam membiayai jumlah pegawai negeri. Namun masih besar kemungkinan untuk perluasan itu melalui sektor manufaktur, perdagangan dan jasa non pemerintahan.

Karakteristik pasar kerja tahun 2005 jelas menunjukkan dari 48.450 penduduk, maka 17.218 penduduk yang bekerja, dan 2864 mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mayoritas masih bekerja di sektor pertanian (1303 orang), Industri (1417 orang) dan Perdagangan (5697 orang). Justru tekanan tenaga kerja berada pada kelompok rumah tangga miskin dan bekerja di sektor informal.

Perluasan lapangan kerja diterjemahkan kepada pengembangan dan penajaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah untuk komoditas manufaktur yang berbasiskan produk produk pertanian dan peternakan. Saat ini lapangan kerja tersedia di berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, dan jasa. Untuk itu setiap tahunnya setidaknya dapat diupayakan perluasan lapangan kerja meningkat sebanyak 5% untuk mampu mengurangi angka pengangguran yang ada. Upaya untuk memperluas lapangan kerja sebesar itu adalah dilakukan

dengan serangkaian kebijakan perluasan investasi, serta memperbesar peranan lembaga yang mampu mendorong terjadinya investasi.

### 3.2.4 Tingkat Pengangguran

Tekanan ketenagakerjaan adalah salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh kota Padang Panjang. Dengan kondisi tahun dasar dimana angka pengangguran sudah mencapai 6,15%, maka perlu diupayakan menurunkan angka pengangguran di satu sisi dengan memperpendek jumlah pencari kerja untuk mendapatkan pasar kerja. Oleh karena mereka yang menganggur lebih banyak berusia muda dan berpendidikan menengah, maka mereka adalah para pencari kerja baru.

Tabel 7  
Proyeksi penduduk, penduduk miskin, dan pengangguran

<b>(jiwa)</b>			
Tahun	Penduduk	pddk miskin	pengangguran
2005	50.279	2.514	8.120
2006	51.797	2.590	8.365
2007	53.334	2.666	8.613
2008	54.891	2.744	8.864
2009	56.468	2.823	9.119
2010	58.065	2.903	9.377
2011	59.681	2.984	9.638
2012	61.318	3.066	9.902
2013	62.976	3.148	10.170
2014	64.653	3.232	10.441
2015	66.351	3.317	10.715
2016	68.070	3.403	10.992
2017	69.809	3.490	11.273
2018	71.569	3.578	11.557
2019	73.350	3.667	11.845
2020	75.151	3.757	12.136
2021	76.974	3.848	12.430
2022	78.817	3.940	12.727
2023	80.682	4.033	13.028
2024	82.568	4.127	13.333
2025	84.475	4.223	13.641

Non-commercial use only



Prediksi penanggulangan pengangguran dilakukan melalui upaya mempertajam kompetensi pendidikan kejuruan, yang relatif memiliki keterampilan. Saat bersamaan perlu pula diupayakan grand strategi pendidikan keterampilan untuk membekali pembekalan kerja kepada calon pencari kerja. Diharapkan setiap tahun diupayakan sebanyak 1000 tenaga angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan memperoleh pendidikan kejuruan.

Di bidang sosial dan pembangunan manusia dan kehidupan yang terkait dengan hal ini, indikator utama yang ditampilkan adalah mengacu kepada perubahan yang menjadi faktor kunci yang akan dicapai dalam proses pembangunan manusia dalam jangka panjang. Lanjutan indikator pembangunan manusia tidak saja pencapaian aspek yang membentuk HDI, namun lebih dari itu, juga menyangkut pencapaian kualitas yang holistik sifatnya.

Prediksi pembangunan manusia ditetapkan menggunakan 10 indikator utama, walaupun masih memungkinkan dikembangkan melalui indikator tambahan lainnya. Di bidang kesehatan manusia indikator yang digunakan adalah angka kematian bayi yang diperkirakan akan turun dari kondisi pencapaian dari 24 per 1000 kelahiran menjadi 10 per 1000 tahun 2025. Termasuk mengurangi angka kekurangan gizi balita dari 14% tahun dasar menjadi 7% tahun akhir.

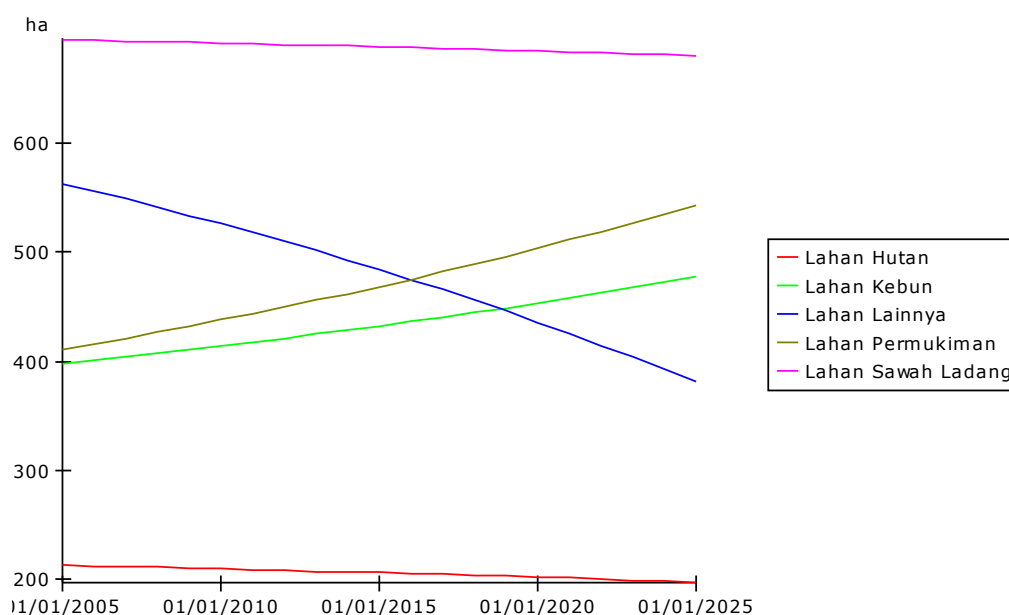
Kemiskinan dan pengangguran adalah dua aspek penting dari pembangunan sumberdaya manusia. Diperkirakan tahun 2016 kondisi kemiskinan akan dapat dikurangi separo dari kondisi tahun dasar, dan angka pengangguran akan dicapai pada level 5% tahun 2025. Upaya yang sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melakukan perbaikan langsung kepada kebutuhan masyarakat miskin, termasuk perlindungan sosial, sementara untuk mengatasi pengangguran, selain diupayakan pertumbuhan ekonomi, persiapan

pembekalan keterampilan kerja adalah salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

### 3.3 Prediksi Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

#### 3.3.1 Pengembangan Tata Ruang Kota

Pemanfaatan kawasan ruang kota Padang Padang Panjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dibagi atas kawasan lindung (konservasi) dan kawasan budidaya (konversi). Kawasan konservasi merupakan kawasan lindung yang dipertahankan untuk terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Kawasan lindung terdiri dari kawasan resapan air dan kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, sempadan sungai, sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau, cagar budaya, taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dan Kawasan Rawan Bencana.



Gambar 9. Proyeksi perubahan penggunaan lahan

Pengembangan tata ruang kota Padang Panjang 20 tahun ke depan (2005-2025) diarahkan untuk mewujudkan ruang kota yang mampu mendukung peningkatan aktifitas pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu juga diarahkan untuk mewujudkan keserasian penempatan aktifitas di atas lahan kota. Kawasan lindung untuk 20 tahun ke depan tetap dipertahankan minimal 30% dari luas wilayah yang 2.300 ha, sedangkan penataan dilakukan terhadap kawasan budidaya. Penataan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan peningkatan pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ruang secara optimal tanpa mengganggu lingkungan hidup.

Kawasan yang menjadi fungsi lindung adalah daerah Bukit Tui. Arah pengembangan daerah sempadan sungai adalah untuk Sungai Batang Anai, Sungai Batang Andok, Sungai Rupik, dan Sungai Bakarek-karek. Cagar budaya merupakan bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan geologi tertentu yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk kota Padang Panjang salah satu bangunan yang termasuk cagar budaya adalah Masjid Asasi di kelurahan Sigando karena mempunyai nilai sejarah yang bermakna. Taman hutan raya atau satwa yang terdapat di kota Padang Panjang adalah habitat kera yang terdapat di lokasi taman wisata perkampungan Minangkabau di kelurahan Silaing Bawah. Sedangkan kawasan rawan bencana yang terdapat di kota Padang Panjang antara lain pertambangan kapur dan galian pasir di Bukit Tui bagian selatan. Seluruh kota merupakan daerah rawan gempa, sedangkan kawasan rawan genangan air adalah sekitar Jalan Sudirman (depan Kantor BRI) dan Kelurahan Balai-Balai (Perumahan KAI). Di masa depan lahan yang diperuntukkan untuk kawasan lindung ini akan berubah fungsi menjadi kawasan budidaya (paling tidak sebahagian), jika tidak ada pengendalian ruang yang sesuai dengan RTRW.

Pola pemanfaatan kawasan budidaya Kota Padang Panjang terutama diarahkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai

dengan peruntukan di dalam RTRW dan mendorong berkembangnya kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW. Rencana perwilayahan kota Padang Panjang pada masa datang dibagi atas 4 (empat ) bagian wilayah kota (BWK). Pembagian BWK, fungsi dan luasnya pada tahun 2025 direncanakan sebagai berikut:

BWK Pusat Kota (BWK-PK) adalah bagian wilayah dengan fungsi kawasan utama kegiatan komersial. Kegiatan yang mendukungnya adalah perkantoran, pendidikan, permukiman, konservasi setempat dan sebagainya. Karakteristik fisik yang membatasi dari BWK Pusat Kota (PK) ini diantaranya di sebelah barat dibatasi oleh Jalan Prof.Dr. Hamka, di utara dibatasi oleh sebagian Jalan H.Agus Salim, di bagian timur dibatasi oleh sungai, dan di selatan berbatasan dengan rel kereta api.BWK ini terdiri dari 3 Sub BWK.

BWK I merupakan bagian wilayah dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung bagi kawasan bawahannya. Pada BWK ini terdapat perbukitan kapur yang merupakan daerah yang sangat baik bagi penyerapan air (kawasan resapan air). Kondisi kawasan seperti diatas menyebabkan wilayah ini perlu dilestarikan keberadaannya. BWK ini berbatasan di bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanah Datar, di bagian Barat dan Utara dibatasi rel kereta api, serta di bagian timur dibatasi dengan aliran sungai.

BWK II merupakan bagian wilayah dengan fungsi primer sebagai kawasan pariwisata. Potensi yang terdapat di BWK ini adalah kondisi alam, objek wisata rumah adat Minangkabau, kerajinan kulit, pertanian dan lain sebagainya. Fungsi ruang pendukungnya adalah fungsi permukiman dan perkantoran. BWK II berbatasan di bagian barat dan utara Sungai Batang Anai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, serta Jalan Prof.Dr.Hamka dan rel kereta api merupakan pembatas yang membentang di bagian Timur ke arah Selatan.

BWK III merupakan wilayah dengan fungsi primer sebagai kawasan pertanian. Tanah yang subur dan irigasi yang cukup merupakan dasar untuk menetapkan wilayah ini sebagai kawasan pertanian. Sebagian lahan cenderung akan beralih fungsi (konversi) kepada kegiatan perkotaan, sehingga fungsi .ruang pendukung di BWK ini adalah pengembangan pemukiman, kesehatan dan kawasan konservasi. Karakteristik wilayah pembatas dari BWK III adalah Kabupaten Tanah Datar pada bagian Utara, Timur dan Selatan, sementara di bagian Barat dibatasi oleh aliran sungai.

### **3.3.2 Pembangunan Wilayah**

Pembangunan wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah, karena melalui pembangunan wilayah kegiatan pembangunan fisik dan sosial ekonomi dikombinasikan dengan aspek geografis dan tata ruang wilayah. Pembangunan ini memadukan pembangunan sektoral dan spasial.

Kondisi Kota Padang Panjang sebagai kota kecil pegunungan dengan lahan yang relatif sempit dan bergelombang di satu sisi dan letaknya yang strategis dalam lalu lintas antar wilayah pada sisi lain menyebabkan pembangunan wilayah Kota Padang Panjang dua puluh tahun ke depan cukup kompleks. Pembagian wilayah pembangunan di Kota Padang Panjang terdiri dari pusat pertumbuhan di pusat Kota Padang Panjang dan dua sub pusat pertumbuhan di dua kecamatan yaitu sub pusat A di Kecamatan Padang Panjang Barat dan sub pusat B di Ibukota Kecamatan Padang Panjang Timur. Di samping itu pembagian wilayah dalam tata ruang sudah cukup mengakomodir pemanfaatan aktifitas di atasnya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dilakukan di masa datang:

- a. Peningkatan kerjasama dengan kota/kabupaten di sekitarnya.
- b. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pembangunan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kota.

### **a. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten dan Kota Sekitarnya**

Kota Padang Panjang merupakan simpul perdagangan terutama bagi produk pertanian, peternakan dan hortikultura dari kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di samping itu sebagai *hinterland* Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang menampung limpahan aktivitas Kota Bukittinggi dalam berbagai bidang seperti perdagangan, kesehatan dan pariwisata. Justru itu dalam 20 tahun ke depan Kota Padang Panjang perlu meningkatkan kerjasama dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Kerjasama dengan Kabupaten Solok sebagai daerah penghasil tanaman pangan dan hortikulturanya yang menjadikan Kota Padang Panjang sebagai pasarnya. Dari Kota Padang Panjang hasil pertanian ini didistribusikan lagi ke kota lain di Sumatera Barat dan luar daerah seperti Riau. Saat ini tercatat puluhan perusahaan pertanian di Kabupaten Solok yang menjual produknya ke Kota Padang Panjang. Peningkatan kerjasama terutama dilakukan antar pedagang/pengusaha. Di samping itu dimasa datang diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah yang mendukung kerjasama antar pengusaha.

Kerjasama dengan Kabupaten Tanah Datar di masa datang perlu ditingkatkan terutama dalam pemasaran produk pertanian dan peternakan. Daging Padang Panjang saat ini sudah dikenal di Sumatera Barat, terutama Kota Padang. Daging ini sebetulnya merupakan produk Kabupaten Tanah Datar yang dijual ke Kota Padang Panjang dan didistribusikan ke kota lain di Sumatera Barat dan bahkan luar Sumatera Barat. Pada masa datang volume perdagangan akan meningkat., Kerjasama yang diperlukan juga antar pengusaha dan antar pemerintah daerah. Kerjasama pengusaha dalam bentuk kesepakatan bisnis. Sedangkan antar pemerintah dalam bentuk kesepakatan untuk menciptakan situasi yang mendukung iklim usaha. Daerah asal (produsen)

cq. Kabupaten Tanah Datar mempunyai komitmen untuk membuat program pengembangan peternakan penghasil daging sedangkan Kota Padang Panjang menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

Kerjasama dengan Kota Bukittinggi di masa datang akan lebih mengarah pada pemanfaatan limbah aktifitas Kota Bukittinggi ke Kota Padang Panjang. Sebagai kota wisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan, kota Bukittinggi saat ini mendapatkan kunjungan dan nilai tambah ekonomi yang cukup besar. Namun saat ini fasilitas yang ada di Kota Bukittinggi belum cukup. Dimasa datang intensitas Kota Bukittinggi pada 4 sektor di atas akan meningkat, sehingga praktis Kota Padang Panjang akan mendapatkan limbahnya.

Sektor pariwisata di Kota Bukittinggi cukup terkenal dengan kunjungan wisatawan domestik dan manca negara yang terus meningkat. Saat ini fasilitas yang ada di Kota Bukittinggi tidak memadai. Fasilitas parkir sangat terbatas, pengaturan lalu lintas belum optimal, sehingga menyebabkan kemacetan. Tingkat hunian hotel pada akhir pekan cukup tinggi. Permintaan terhadap restoran dan rumah makan juga naik di masa datang. Demikian juga halnya dalam pengadaan jasa wisata/biro perjalanan. Kondisi ini merupakan peluang bagi Kota Padang Panjang, apalagi wisata Kota Padang Panjang mempunyai wisata khas berupa wisata religius.

Industri dan perdagangan konveksi di Kota Bukittinggi meningkat pesat. Kondisi ini juga terkait dengan menurunnya peran Kota Padang dalam perdagangan grosir sandang dan pangan pasca pemindahan terminal regional ke Air Pacah. Pedagang grosir dari Kota Padang pindah ke Bukittinggi, sehingga aktifitas perdagangan di kota ini meningkat pesat. Kota Padang Panjang berpotensi untuk memanfaatkan limbah aktifitas tersebut.

Sebagai kota pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi sudah berkembang berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium kesehatan dan apotik. Namun kuantitas dan terutama kualitas pelayanan masih belum optimal. Kondisi ini juga merupakan peluang bagi Kota Padang Panjang untuk mengisi kekurangan yang terdapat dari fasilitas dan pelayanan kesehatan dari Kota Bukittinggi. Jarak yang cukup dekat dan sarana dan prasarana transportasi yang cukup tersedia dari Bukittinggi ke Padang Panjang merupakan peluang bagi Kota Padang Panjang.

Dalam bidang kesehatan dimasa datang masih terdapat peluang untuk menyediakan jasa kesehatan terutama bagi kalangan menengah atas di Sumatera Tengah dengan pola pelayanan kesehatan yang prima. Peluang ini terlihat dari masih tingginya angka kunjungan berobat kalangan menengah atas di Sumatera Tengah ke Malaysia. Berarti peluang dalam bidang kesehatan ini ke depan cukup terbuka dengan kata kunci fasilitas yang memadai dan pelayanan yang prima. Iklim Kota Padang Panjang yang sejuk merupakan kondisi yang cukup mendukung pengembangan sektor kesehatan.

Pendidikan umum dan agama sampai tingkat SLTA cukup berkembang dengan baik di Kota Padang Panjang. Sebagai Kota Serambi Mekah dan mempunyai tradisi yang panjang dalam pengelolaan pesantren, Kota Padang Panjang mempunyai peluang untuk mengembangkan pendidikan dengan nuansa religi dimasa datang. Iklim yang sejuk, sangat mendukung untuk kegiatan pendidikan. Justru itu terdapat peluang untuk mengembangkannya dimasa datang.

Berdasarkan uraian diatas, pada masa datang Kota Padang Panjang berpotensi untuk mengembangkan diri sebagai kota perdagangan, pariwisata, kesehatan dan pendidikan. Penempatan aktifitas ini juga didukung oleh rencana tata ruang yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan ruang di Kota Padang Panjang.



## **b. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan**

Pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan memerlukan sinkronisasi dan sinergi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan. Justru itu koordinasi pembangunan menjadi sangat penting. Dengan adanya konsep pembangunan wilayah, maka pelaksanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan secara terpadu. Namun demikian koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan tetap diperlukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) perlu dilakukan untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan daerah.

## **c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota**

Prasarana Daerah secara fisik terdiri dari prasarana transportasi, komunikasi dan sanitasi. Jalan raya prasarana transportasi berupa jalan di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 jo Undang-undang Nomor 26 tahun 1985 tentang jalan dapat diklasifikasikan atas jalan arteri, kolektor dan lokal. Jalan arteri menghubungkan kota orde ke-1 dengan kota orde ke-1 atau ke-2, jalan kolektor menghubungkan kota orde ke-2 dengan orde ke-2 atau ke-3 (pusat kota kecamatan). Jalan lokal menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau kota jenjang ketiga dengan jenjang ke tiga.

Di masa datang untuk memenuhi kebutuhan transportasi regional, diperlukan pengembangan jalan kolektor di sebelah barat dengan titik awal di daerah Taman Bunga jalan St.Syahrir sampai pertemuan dengan jalan Prof.Dr.Hamka yang menghubungkan antara kota Padang dan Bukittinggi. Di sebelah utara akan berkembang jalan yang menghubungkan Kota Solok dengan Bukittinggi.

Kebutuhan terhadap perkembangan jalan kolektor sekunder memerlukan peningkatan kondisi jalan yang telah ada dan pembangunan jalan baru. Peningkatan jalan yang sudah ada perlu dilakukan terhadap jalan Sutan Syahrir, Jalan M.Yamin, Jalan Sukarno Hatta, Jl.Jenderal Sudirman, Jl.A.Yani, Jl.H.Miskin dan Jl.Sultan Ibrahim Musa. Sedangkan rencana pembangunan jalan baru adalah jalan lingkaran Selatan. Jalan lingkungan dimasa depan perlu ditingkatkan dan juga dibangun jalan baru. Jalan yang perlu ditingkatkan adalah Jl.Anas Karim, Jl.Urip Sumahardjo, Jalan Tanah, jalan ke Sabu, Jl.Padat Karya, Jl.Syech M.Jamil dan sebagian jalan Sultan Ibrahim Musa.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan indah perlu dikembangkan jalur hijau. Lokasi pembangunannya disesuaikan dengan rencana pengembangan trotoar, terutama di daerah pusat kota dan lokasi pengembangan pemukiman baru di Kelurahan Ngalau, Kelurahan Ganting, Kelurahan Sigando, dan Kelurahan Ekor Lubuk.

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan aktifitas kota, kebutuhan terhadap air bersih juga meningkat di Kota Padang Panjang masa datang. Pengembangan jaringan air bersih perlu dilakukan berdasarkan hirarki jalan. Pengembangan jaringan primer dilakukan pada jaringan jalan utama sedangkan pada kawasan pemukiman perlu dikembangkan jaringan sekunder. Pengembangan drainase juga diperlukan dimasa datang. Untuk itu sistim yang digunakan diperkirakan masih bisa menggunakan sistim aliran air alamiah berdasarkan kontur dan outlet pengaliran pada sungai Batang Anai dan Batang Andok sebagai saluran utama.

Tabel 8.  
Proyeksi kebutuhan rumah, air, dan listrik

Time	Air (ltr/da)	Listrik(watt)	Rumah
01/01/2005	7.541.850	16.339.700	11.173
01/01/2006	7.769.517	30.864.744	11.510
01/01/2007	8.000.118	45.828.259	11.852
01/01/2008	8.233.671	61.235.894	12.198
01/01/2009	8.470.195	77.093.334	12.548
01/01/2010	8.709.706	93.406.302	12.903
01/01/2011	8.952.224	110.180.551	13.263
01/01/2012	9.197.764	127.421.871	13.626
01/01/2013	9.446.342	145.136.083	13.995
01/01/2014	9.697.973	163.329.037	14.367
01/01/2015	9.952.673	182.006.615	14.745
01/01/2016	10.210.456	201.174.727	15.127
01/01/2017	10.471.336	220.839.310	15.513
01/01/2018	10.735.324	241.006.327	15.904
01/01/2019	11.002.433	261.681.765	16.300
01/01/2020	11.272.675	282.871.637	16.700
01/01/2021	11.546.060	304.581.975	17.105
01/01/2022	11.822.597	326.818.831	17.515
01/01/2023	12.102.296	349.588.277	17.929
01/01/2024	12.385.165	372.896.403	18.348
01/01/2025	12.671.210	396.749.313	18.772
01/01/2026	12.960.439	421.153.126	19.201
01/01/2027	13.252.856	446.113.970	19.634

Non-commercial use only

Kebutuhan terhadap energi listrik juga akan meningkat pada tahun rencana. Peningkatan ini disebabkan peningkatan pemakaian tenaga listrik oleh rumah tangga dan industri. Kebutuhan pengadaan energi listrik pada tahun rencana didasarkan kepada asumsi luas/jenis rumah sebagai berikut:

- 1) Rumah dengan persil seluas 300 m<sup>2</sup> dan 500 m<sup>2</sup> memerlukan daya listrik 1300 Watt
- 2) Rumah dengan luas persil 150 m<sup>2</sup> memerlukan daya listrik 900 watt
- 3) Kebutuhan non rumah tangga (fasilitas pelayanan) memerlukan daya listrik sebesar 2% kebutuhan perumahan.

Peningkatan kebutuhan terhadap jaringan telepon juga akan meningkat dalam jangka panjang. Walaupun saat ini jaringan distribusi sudah terpasang di seluruh wilayah kota, untuk masa datang perlu dikembangkan terutama ke arah pengembangan kawasan pemukiman baru di bagian timur dan selatan Kota Padang Panjang.

00000

# Bab IV

## VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Visi

Visi pembangunan jangka panjang pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 20 tahun mendatang. Dengan kata lain, visi pembangunan jangka panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita warga Kota Padang Panjang yang diinginkan di masa mendatang. Visi Kota Padang Panjang jangka panjang adalah sebagai berikut:

#### ***”KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”***

- ☑ **Maju** ditandai dengan sarana dan prasarana dengan standar kota antar bangsa/internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; serta produktivitas yang makin tinggi; perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; sosial politik ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi
- ☑ **Lestari**, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak

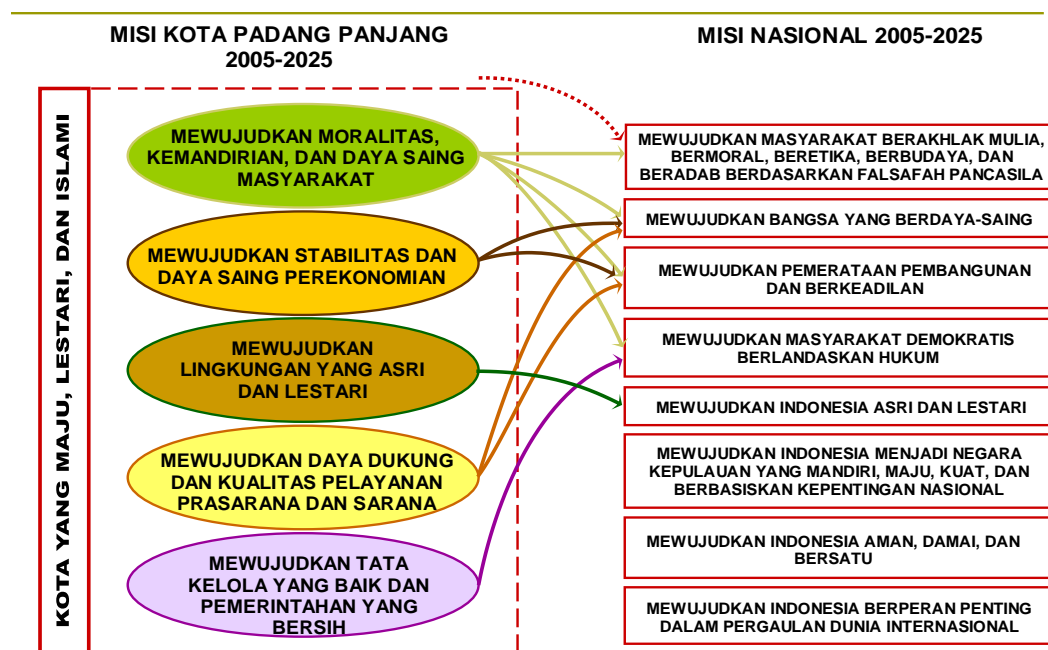
pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia.

- ☑ **Islami** akan menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

## 4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 20 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat
2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian
3. Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.



Gambar 10. Hubungan Misi Kota Padang Panjang dan Misi Nasional

### **Sasaran Misi 1: Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat**

- a. Menurunnya buta membaca dan menulis al-Quran sampai kurang dari 1%.
- b. Meningkatnya sikap kedisiplinan, kebersihan dan saling tolong menolong
- c. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 83,06, yang ditandai dengan tercapainya indeks pendidikan 95,25, indeks kesehatan 87,99, dan indeks daya beli 65,92;
- d. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk, berkisar antara 1,25 - 2,00%;
- e. Menurunnya tingkat kemiskinan, menjadi tidak lebih dari 5,00%;
- f. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menjadi tidak lebih dari 5,00%;
- g. Tidak adanya kriminalitas, kemaksiatan, dan perjudian.

### **Sasaran Misi 2: Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian**

- a. Meningkatnya peran zakat, infaq, shadaqah, dan lembaga keuangan syariah dalam perekonomian daerah.
- b. Meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menjadi Rp. 5.288 milyar;
- c. Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku menjadi Rp. 4.277 milyar;
- d. Meningkatnya PDRB per Kapita menjadi Rp. 74,2 juta;
- e. Peran sektor sekunder dan tersier menjadi 93,00% terhadap perekonomian daerah.

### **Sasaran Misi 3: Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari**

- a. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Terpeliharanya proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 30,00%;

- c. Meningkatnya jumlah sampah terangkut, menjadi tidak kurang dari 90,00%;
- d. Menurunnya luasan daerah genangan banjir

**Sasaran Misi 4: Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana Dan Sarana**

- a. Tersedianya jalan dalam kondisi baik tidak kurang dari 95,00%, disertai dengan terpenuhinya fasilitas kelengkapan jalan;
- b. Tercapainya kecepatan rata-rata perjalanan sekurang-kurangnya 15 km/jam dengan V/C rasio maksimal 0,85;
- c. Tercapainya tingkat hunian rumah tangga menjadi 97,50%, diimbangi dengan kelengkapan prasarana dan sarana pendukungnya

**Sasaran Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

- a. Terbentuknya struktur kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional, yang disertai dengan kapasitas manajerial, aparatur, serta prasarana dan sarana pemerintahan;
- b. Meningkatnya jiwa kewirausahaan para aparatur pemerintahan daerah
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengawasan dan pengendaliannya;
- d. Terwujudnya supremasi hukum dan bertumbuhkembangnya budaya demokrasi, aman dan tertib.
- d. Terbentuknya kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
- e. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan daerah
- f. Meningkatnya pelayanan publik
- g. Meningkatnya keterpaduan antar instansi vertikal dan horisontal.



### **4.3 Arah Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi dan misi jangka panjang tersebut, ditetapkan arah pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 20 tahun ke depan. Membangun kota Padang Panjang ke depan pada dasarnya memilih arah pembangunan sedemikian rupa untuk menemukan persoalan dengan dan fakta yang jelas, kemudian merumuskan alternatif pemecahannya dan arah pembangunan kota, memilih kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dapat dijadikan sebagai modal dasar baik yang ada secara alamiah maupun yang direayasa selama proses pembangunan. Kelemahan secara internal perlu ditemukan dan diperbaiki segera agar kelemahan tersebut dapat diatasi dengan serangkaian pemecahan masalah yang dihadapi. Sementara peluang yang muncul secara eksternal dapat mendorong proses pembangunan Padang Panjang jika hal itu dimanfaatkan secara baik dan dengan cara yang elegan, yang baik pula. Demikian ancaman yang terjadi yang berasal dari faktor eksternal perlu dipahami dan kemudian dicari cara menangkis ancaman tersebut. Sehingga dalam jangka panjang kesadaran akan pentingnya kemajuan yang ingin dicapai berikut segala perubahan yang akan terjadi perlu dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat kota.

Memperhatikan kondisi umum daerah, perubahan lingkungan strategis, prediksi pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang serta visi dan misi jangka panjang Kota Padang Panjang sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 2005-2025 mendatang ditetapkan sebagai berikut:

### **4.3.1 Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat**

Pembangunan bidang keagamaan akan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dan peningkatan *Iman dan Taqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka ini perlu ditingkatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implentasi dari syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, fondasi kegiatan pembangunan hendaknya mengacu kepada syariah yang ada. Upaya untuk memfungsikan institusi pendidikan Islam bermuatan pada agama dan budaya menjadi satu kesatuan yang memberikan citra tersendiri bagi kota ini. Dalam jangka panjang kota ini perlu melahirkan kembali ulama besar yang dapat memberikan pengayaan dalam mensyiarkan agama, khususnya agama Islam. Untuk keperluan ini dari segi normatif diperlukan pengembangan Peraturan Daerah (PERDA) yang berwawasan syariah, dari berbagai segi yang diperlukan dari ketentuan yang masih perlu diperbaiki saat ini. Hal ini sangat penting artinya agar kehidupan masyarakat betul-betul mengikuti nilai-nilai Islami dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist. Sejalan dengan hal kegiatan ekonomi dan sosial perlu digiring kearah kegiatan yang memiliki dasar dan fondasi syariah.

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun hingga tahun 2010; peningkatan kualitas lulusan melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan, pengembangan proses pembelajaran, peningkatan kelayakan guru mengajar berbasis kompetensi dan karir, peningkatan sarana pembelajaran dan pengembangan kreativitas; peningkatan relevansi pendidikan yang mampu merespon kebutuhan pembangunan dan globalisasi; peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi; serta peningkatan tata kelola pendidikan.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada upaya pencapaian perilaku sehat dan lingkungan sehat yang mendukung produktivitas masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan;

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya percepatan peningkatan dan penyiapan sumberdaya manusia angkatan kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan dunia kerja di Kota Padang Panjang melalui: perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja bagi angkatan kerja; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja baik untuk lebih mampu meningkatkan daya tampung dan kualitas peserta diklat kerja serta daya serap alumni diklat kerja; serta penataan kebijakan dalam kaitannya dengan penyerapan angkatan kerja lokal serta kesejahteraan tenaga kerja;

Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada upaya optimalisasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta perluasan pelayanan pembinaan kesejahteraan keluarga;

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada peningkatan akses terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); serta perluasan dan peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan berbagai permasalahan sosial;

Pembangunan di bidang kebudayaan diarahkan kepada pengembangan dan penerapan budaya daerah diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penggalian serta menimbulkan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya Minangkabau, seni dan budaya yang

terdapat dalam masyarakat Padang Panjang. Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, kegiatan yang perlu dilakukan antara lain meliputi penerapan tata kehidupan masyarakat berdasarkan budaya Minangkabau, menerapkan dan mengembangkan upacara-upacara adat pada waktu dan kegiatan-kegiatan tradisional tertentu. Di samping itu, perlu pula diupayakan kegiatan untuk menggali dan mengembangkan nilai tradisional seni dan budaya Minangkabau dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan kreativitas dibidang pidato adat (petatah dan petitih), lagu-lagu Minang, seni lukis dan berbagai aspek kesenian lainnya.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM pemuda khususnya yang terkait dengan keterampilan dan kecakapan hidup; peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik; pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat;

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada perluasan dan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah di berbagai bidang.

Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada upaya meningkatkan rasa aman dan budaya tertib dalam mendukung lingkungan kota yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan; serta meningkatkan budaya demokratis yang

bertanggungjawab sebagai salah satu bentuk jati diri masyarakat Kota Padang Panjang di masa mendatang

#### **4.3. 2 Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian**

Pembangunan bidang ekonomi islam diarahkan pada peningkatan peran zakat, infaq, shadaqah, dan lembaga keuangan syariah dalam perekonomian daerah. Peran ini terutama difokuskan pada kegiatan ekonomi yang berbasis masyarakat dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman.

Pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada upaya pengembangan pelayanan dan promosi investasi secara lebih luas, efektif dan intensif untuk meningkatkan realisasi investasi; peningkatan pengembangan promosi investasi terutama diarahkan untuk menumbuhkan realisasi investasi pada kelompok sektor jasa, sedangkan sektor industri dilakukan secara lebih selektif dengan berorientasi pada prinsip industri yang ramah lingkungan;

Pembangunan bidang industri diarahkan pada pengembangan industri Kecil Menengah (IKM) sehingga industri kecil menengah mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional; pembangunan industri yang berkelanjutan, dimana produksi industri harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga dapat menghasilkan industri produksi bersih (*green product/ecological product*) terutama industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah;

Pembangunan bidang perdagangan di arahkan pada peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional jaringan perdagangan ekspor; meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien dengan harapan akan terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat; peningkatan perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri;

Pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) diarahkan pada pengembangan KUMKM agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik;

Pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada upaya pengembangan sumberdaya dan potensi pariwisata dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja;

Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya perlindungan usaha tani serta mendorong produktivitas usaha tani dan kemampuan menghasilkan komoditas yang baik;

Pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup serta aman, merata dan terjangkau ditingkat rumah tangga dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

Pembangunan bidang penyuluhan diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penyuluh pertanian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mampu merespon kebutuhan pembangunan dan globalisasi; peningkatan akses penyuluh dan petani/keompok tani terhadap ilmu dan teknologi serta memfasilitasi berkembangnya kelembagaan tani dan kemitrausahaan di bidang pangan.

### **4.3.3 Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari**

Pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan Kota Padang Panjang melalui peningkatan pengendalian pencemaran dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional; perlindungan atau pemulihan daerah resapan air; penataan dan penegakan hukum lingkungan; penguatan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan; penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pendidikan lingkungan, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat; peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Pembangunan bidang penataan ruang diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang yang serasi serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktifitas perekonomiannya, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang; serta pengembangan kerjasama antardaerah dalam penataan ruang

### **4.3.4 Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana**

Pembangunan bidang pekerjaan umum diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kinerja pelayanan prasarana jalan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan; pengembangan akses-akses baru ke ibukota Provinsi untuk memperlancar mobilitas warga dalam melakukan berbagai aktivitas di ibukota; konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai; peningkatan ketersediaan dan pelayanan drainase; pengembangan

pelayanan air bersih; pembangunan perkantoran yang representatif; pembangunan prasarana dan sarana umum; dan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat.

Pembangunan bidang perhubungan diarahkan pada penataan manajemen operasional transportasi yang baik, mencakup; pengembangan transportasi massal serta memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan dan penumpang angkutan umum; mereduksi dan mengeliminasi sumber-sumber kemacetan yang menjadi faktor utama keterlambatan lalu lintas; pengembangan transportasi air untuk mengurangi kemacetan jalan darat; serta pengembangan jaringan terminal;

Pembangunan bidang perumahan diarahkan pada peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal layak huni, terutama bagi masyarakat miskin; pengembangan hunian dengan pola vertikal untuk mengoptimalkan daya dukung lahan; serta penataan kawasan kumuh perkotaan dan squater area

#### **4.3.5 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Pembangunan bidang pemerintahan umum diarahkan pada harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; penataan struktur organisasi perangkat daerah; peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;

Pembangunan bidang kepegawaian diarahkan pada peningkatan kompetensi pegawai melalui pengembangan sistem perencanaan dan pengembangan karir; pengembangan diklat bagi pegawai yang berbasis



kebutuhan pembangunan di daerah dan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah; serta pengembangan pola mutasi berbasis kompetensi, promosi, dan pertukaran antar fungsi untuk memperkaya pengalaman aparatur, serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

Pembangunan bidang perencanaan pembangunan diarahkan pada pemantapan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah; peningkatan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan;

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada perwujudan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat; memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat; serta meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan;

Pembangunan bidang statistik dan kearsipan diarahkan pada pembenahan pengelolaan data dan informasi pembangunan secara terpadu, komprehensif, terbaharui dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

## **4.4 Pentahapan Pembangunan Daerah**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit tentang arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang 2005-2025 periode, perlu dilakukan pentahapan pembangunan untuk masing-masing periode lima tahunan. Pentahapan menurut periode lima tahunan ini sengaja dipilih sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Dengan demikian, pentahapan pembangunan ini akan dapat memberikan arahan yang lebih jelas untuk masing-masing periode pemerintahan. Di samping itu, pentahapan pembangunan ini juga bermanfaat untuk dapat memberikan pedoman dan arah pembangunan yang lebih jelas untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap periode.

### **4.4.1 Periode Lima Tahun Pertama (2008-2013)**

#### **Mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumberdaya daerah yang akan menjadi pondasi menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju**

Pada periode ini kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang terutama diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam rangka menyediakan fondasi yang kuat bagi pengembangan kegiatan Perhubungan dan Komunikasi, Perdagangan dan Jasa. Kebutuhan yang sangat mendesak dewasa ini adalah peningkatan kualitas prasarana jalan raya, sarana pasar, pembangunan tenaga listrik dan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas persampahan untuk meningkatkan kebersihan kota.

Sejalan dengan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan tersebut dilakukan upaya-upaya intensif untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dibidang pendidikan, kegiatan

pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui pembangunan gedung sekolah berikut perlengkapannya, penambahan dan peningkatan kualitas tenaga guru, penyediaan buku dan peralatan laboratorium secara tersebar pada pusat-pusat pemukiman penduduk. Perhatian khusus dalam hal ini diberikan pada pembangunan gedung pendidikan keagamaan yang merupakan ciri khusus Kota Padang Panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, perlu pula dilakukan upaya intensif untuk penyebaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit daerah dan PUSKESMAS, penambahan tenaga dokter dan para medis serta penyediaan sarana kesehatan lainnya. Sementara itu, upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan secara intensif perlu pula dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Padang Panjang.

Untuk menggerakkan kegiatan ekonomi kota, upaya yang intensif perlu diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang meliputi kegiatan perhubungan, perdagangan dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula dikembangkan kegiatan usaha mikro, kecil serta kegiatan koperasi. Peranan pemerintah daerah pengembangan ekonomi kerakyatan ini adalah adalah dalam pemberdayaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan akses ke sumber permodalan, pembinaan kemampuan manajerial dan peningkatan pemasaran produk.

Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) sudah harus dimulai sejak periode pertama ini. Hal ini sangat penting artinya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Di samping itu, melalui perwujudan tata-pemerintahan yang baik ini

diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah akan dapat lebih dioptimalkan.

**4.4.2 Periode Lima Tahun Kedua (2014-2018)**  
**Memantapkan kemandirian daerah dengan menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastruktur, kumkm, dan pemerintahan**

Pada periode ini pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sudah mulai kembali membaik karena prasarana perhubungan, tenaga listrik dan kualitas sumberdaya manusia secara bertahap sudah mulai membaik. Karena itu, kegiatan pembangunan kota pada periode ini sudah dapat diarahkan pada pembangunan ekonomi lokal secara lebih intensif. Dalam hal ini, kegiatan utama perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sehingga pendapatan petani dapat ditingkat secara lebih berarti. Di samping itu, dimulai pula usaha-usaha untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pengembangan kegiatan industri yang bersifat agro industri, maining based industri dan kegiatan perdagangan dan jasa. Sejalan dengan hal ini, potensi pariwisata yang belum digarap secara optimal sudah harus pula ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sosial budaya yang ada di Kota Padang Panjang.

Sejalan dengan kegiatan tersebut, upaya untuk peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan terus pula dilanjutkan, tidak hanya untuk sektor perhubungan, tetapi juga termasuk pembangunan perhubungan kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata. Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik dibidang pendidikan dan kesehatan terus pula ditingkatkan secara tersebar keseluruhan kecamatan. Sedangkan dibidang kesehatan tekanan sebaiknya

diberikan pada peningkatan penyediaan fasilitas rumah sakit daerah, Puskesmas dan tenaga medis.

#### **4.4.3 Periode Lima Tahunan Ketiga (2019-2023)**

**Persiapan menuju kondisi kota padang panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas**

Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sudah mencapai titik lebih tinggi. Kondisi prasarana dan sarana ekonomi sudah tersedia dalam jumlah memadai dan kualitas yang baik. Demikian pula halnya dengan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan merata keseluruhan kecamatan. Sementara itu, kegiatan perhubungan, perdagangan dan jasa sudah dapat dilaksanakan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Karena kondisi yang telah demikian membaik, maka arah pembangunan daerah Kota Padang Panjang pada periode ini diletakkan pada pembangunan kegiatan agro-industri, perdagangan hotel dan restoran serta kegiatan jasa. Kesemua jenis kegiatan ini diharapkan telah mulai menggunakan teknologi produksi lebih tinggi sehingga nilai tambah yang dapat dihasilkan untuk masyarakat juga menjadi lebih tinggi, dan hal selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Sementara itu, pada tahun 2020, sesuai dengan kesepakatan dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia-Pacific Economic Cooperation*, APEC), perekonomian dunia sudah berada dalam globalisasi penuh, tidak hanya negara maju tetapi juga negara sedang berkembang. Dalam situasi demikian, persaingan antar pelaku usaha ekonomi kota akan semakin tajam. Karena itu, pengembangan kegiatan ekonomi daerah harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing produk agar pengusaha lokal dapat

bertahan dalam situasi persaingan yang semakin mengglobal. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) pada periode ini sudah harus menjadi prioritas pembangunan daerah agar pengembangan teknologi tinggi (*High-tech*) dalam kegiatan produksi sudah mulai dapat dilaksanakan. Di samping itu, upaya untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik juga harus mendapat perhatian yang lebih besar pada periode ini.

Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang tinggi harus dapat diwujudkan pada periode ini agar tenaga kerja lokal dapat bertahan dalam persaingan yang semakin tajam dengan pekerja yang masuk dari negara lain. Dalam rangka ini, program pendidikan harus diarahkan untuk dapat mencapai mutu dan standar internasional sehingga tamatan lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Demikian juga dengan, kualitas pelayanan kesehatan harus cukup tinggi dan prima sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat sejajar dengan kondisi rata-rata pada tingkat nasional.

#### **4.4.4 Periode Lima Tahun Keempat (2024-2028)**

**Pembentukan kota padang panjang menuju ‘kota yang maju’ dengan menekankan pada upaya pemantapan daya saing perekonomian dan sumberdaya manusia**

Pada periode ini, daerah harus dapat mewujudkan visi jangka panjang yang telah ditetapkan daerah yaitu terwujudnya masyarakat *Padang Panjang yang Islami dan Makmur*. Pelaksanaan tata kehidupan masyarakat yang Islami sudah harus dapat terlaksana secara baik. Di samping itu, upaya-upaya untuk mewujudkan Kota Padang Panjang yang makmur diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha disemua sektor kegiatan ekonomi kota. Demikian juga dengan, struktur perekonomian kota diharapkan

sudah mencapai tahap industrialisasi dengan tekanan pada agroindustri, perdagangan dan jasa.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Kota Padang Panjang yang adil terutama diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja sehingga tidak lagi terdapat pengangguran secara terbuka. Dalam kaitan dengan hal ini dilakukan pula peningkatan kesempatan berusaha, sehingga pengusaha lokal dapat berkembang sejajar dengan pengusaha yang datang dari luar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk menghilangkan jumlah penduduk miskin semakin intensif dilakukan sehingga jumlah penduduk miskin yang terdapat di daerah sudah menjadi sangat sedikit sekali. Dengan demikian diharapkan distribusi pendapatan akan semakin merata dan perbedaan antara golongan kaya dan golongan miskin sudah sangat kecil.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sejahtera terutama diarahkan pada pencapaian kualitas sumberdaya manusia yang tinggi dan produktif. Dalam kaitan dengan hal ini, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah sudah harus mendekati sasaran yang diharapkan dan setara dengan kondisi rata-rata Indonesia. Hal yang sama juga terdapat dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga kualitas kesehatan masyarakat sudah berada pada tingkat yang sangat baik sesuai dengan harapan masyarakat. Ini berarti bahwa tingkat pembangunan manusia di Kota Padang Panjang sudah mencapai tingkat yang menyamai kondisi yang terdapat pada kota-kota skala menengah di Indonesia.

**Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan  
Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025**

No	Arah Pembangunan Jangka Panjang	RPJM Ke-1 (2008-2013)	RPJM Ke-2 (2014-2018)	RPJM Ke-3 (2019-2023)	RPJM Ke-4 (2024-2028)
		Mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumber daya daerah yang akan menjadi pondasi menuju kondisi kota padang panjang yang maju	Memantapkan kemandirian daerah dengan menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastrukturn kumkm, dan pemerintahan	Persiapan menuju kondisi kota padang panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas	Pembentukan kota padang panjang menuju kota yang maju dengan menekankan pada upaya pemantapan daya saing perekonomian dan sumber daya manusia
1	Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat	a. peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui pembangunan gedung sekolah berikut perlengkapannya, penambahan dan peningkatan kualitas tenaga	a. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dibidang pendidikan dan kesehatan secara tersebar keseluruh kecamatan. b. Peningkatan penyediaan fasilitas rumah sakit daerah, Puskesmas dan	a. Peningkatan program pendidikan untuk dapat mencapai mutu dan standar internasional sehingga tamatan lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. b. Peningkatan kualitas pelayanan	a. Intensifikasi penanggulangan kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin yang terdapat di daerah sudah menjadi sangat sedikit sekali. Dengan demikian diharapkan distribusi



		<p>guru, penyediaan buku dan peralatan laboratorium secara tersebar pada pusat-pusat pemukiman penduduk.</p> <p>b. pembangunan prasarana pendidikan keagamaan yang merupakan ciri khusus Kota Padang Panjang.</p> <p>c. penyebaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit daerah dan PUSKESMAS. penambahan tenaga dokter dan para medis serta penyediaan sarana kesehatan lainnya.</p> <p>d. penanggulangan</p>	<p>tenaga medis.</p>	<p>kesehatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat sejajar dengan kondisi rata-rata pada tingkat nasional.</p>	<p>pendapatan akan semakin merata dan perbedaan antara golongan kaya dan golongan miskin sudah sangat kecil.</p> <p>a. pencapaian kualitas sumberdaya manusia yang tinggi dan produktif</p> <p>b. Optimalisasi kualitas dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah untuk mendekati sasaran yang diharapkan dan setara dengan kondisi rata-rata Indonesia.</p> <p>c. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sehingga kualitas</p>
--	--	---	----------------------	---	--

		kemiskinan secara intensif perlu pula dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Padang Panjang.			kesehatan masyarakat mencapai tingkat yang sangat baik sesuai dengan harapan masyarakat. d. upaya mencapai tingkat pembangunan manusia di Kota Padang Panjang menyamai kondisi yang terdapat pada kota-kota skala menengah di Indonesia.
2	Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian	a. pembangunan ekonomi kerakyatan yang meliputi kegiatan perhubungan, perdagangan dan jasa. b. pengembangkan kegiatan usaha mikro, kecil serta kegiatan koperasi	a. pembangunan ekonomi lokal secara lebih intensif. b. peningkatan produktivitas petani c. meletakkan landasan yang kuat bagi pengembangan kegiatan industri yang bersifat agro industri, dan	a. pembangunan kegiatan agro-industri, perdagangan, hotel dan restoran serta kegiatan jasa. Kesemua jenis kegiatan ini diharapkan telah mulai menggunakan	a. meningkatkan penyediaan lapangan kerja sehingga tidak lagi terdapat pengangguran secara terbuka. b. peningkatan kesempatan berusaha, sehingga

		<p>melalui pemberdayaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan akses ke sumber permodalan, pembinaan kemampuan manajerial dan peningkatan pemasaran produk.</p>	<p>kegiatan perdagangan dan jasa.</p> <p>d. Optimalisasi potensi pariwisata dengan memanfaatkan potensi sosial budaya yang ada di Kota Padang Panjang.</p>	<p>teknologi produksi lebih tinggi sehingga nilai tambah yang dapat dihasilkan untuk masyarakat juga menjadi lebih tinggi, dan hal selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.</p> <p>b. peningkatan produktivitas dan daya saing produk agar pengusaha lokal dapat bertahan dalam situasi persaingan yang semakin mengglobal.</p> <p>c. pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) untuk pengembangan</p>	<p>pengusaha lokal dapat berkembang sejajar dengan pengusaha yang datang dari luar daerah.</p> <p>c. peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha disemua sektor kegiatan ekonomi kota sehingga struktur perekonomian kota diharapkan sudah mencapai tahap industrialisasi dengan tekanan pada agroindustri, perdagangan dan jasa.</p>
--	--	--	--	---	---

				teknologi tinggi ( <i>High-tech</i> ) dalam kegiatan produksi sudah mulai dapat dilaksanakan.	
3	Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari	pembangunan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan	Optimalisasi fasilitas sarana dan prasarana lingkungan
4	Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana	<p>a. pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam rangka menyediakan fondasi yang kuat bagi pengembangan kegiatan Perhubungan dan Komunikasi, Perdagangan dan Jasa.</p> <p>b. peningkatan kualitas prasarana jalan raya, sarana pasar, pembangunan tenaga listrik dan penyediaan air</p>	Lanjutan upaya peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan tidak hanya untuk sektor perhubungan, tetapi juga termasuk pembangunan perhubungan kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata.	<p>a. pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam rangka menyediakan fondasi yang kuat bagi pengembangan kegiatan Perhubungan dan Komunikasi, Perdagangan dan Jasa (lanjutan)</p> <p>b. peningkatan kualitas prasarana jalan raya, sarana pasar, pembangunan tenaga listrik dan</p>	<p>a. Optimalisasi pembangunan prasarana dan sarana perkotaan</p> <p>b. Optimalisasi kualitas prasarana jalan raya, sarana pasar, pembangunan tenaga listrik dan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak</p>

		minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.		penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (lanjutan).	
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	<p>a. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance</i>)</p> <p>b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah</p>	<p>a. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance</i>) (lanjutan)</p> <p>b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah (lanjutan)</p>	<p>c. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance</i>) (lanjutan)</p> <p>d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah (lanjutan)</p>	<p>e. Optimalisasi tata-pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance</i>)</p> <p>f. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah</p>

00000

## **Bab V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Panjang 2005-2025 ini berisikan analisis kondisi umum daerah, visi, misi dan arah pembangunan Kota Padang Panjang untuk masa 20 tahun ke depan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan kota. Selanjutnya, RPJPD ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu, RPJPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota Padang Panjang, memerlukan konsistensi kebijakan pemerintah, koordinasi yang baik, komitmen dan dukungan dari semua pihak, baik Alim Ulama, pemuka adat, aparatur kota, cerdik pandai dan tokoh masyarakat. Di samping itu, keberpihakan kepada kepentingan seluruh warga kota dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini.

00000